



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK  
DI SD NEGERI 2 BREBES  
KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

**disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pendidikan**

**Oleh  
Bayu Setya Abrori  
1401415101**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Manajemen Peserta Didik di SDN Brebes 02 Kabupaten Brebes” karya,

nama : Bayu Setya Abrori

NIM : 1401415101

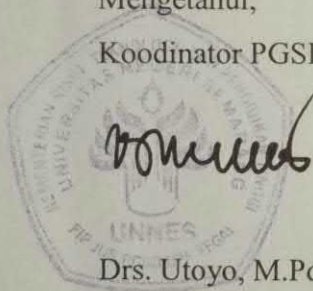
program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1

telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke panitia ujian skripsi.

Tegal, 17 Juni 2019

Mengetahui,

Koodinator PGSD UPP Tegal,



Drs. Utoyo, M.Pd.

NIP 19620619 198703 1 001

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Suhardi', written over a horizontal line.

Drs. Suhardi, M.Pd.

NIP 19570201 198103 1 006

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Implementasi Manajemen Peserta Didik di SD Negeri 2 Brebes Kabupaten Brebes* karya Bayu Setya Abrori 14014151011401415345 ini telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi Universitas Negeri Semarang pada tanggal Juli 2019 dan disahkan oleh Panitia Ujian.

Semarang, 29 Juli 2019

Panitia



Ketua,

Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd  
NIP 195908211984031001

Sekretaris,

Drs. Utoyo, M.Pd  
NIP 19620619 198703 1 001

Penguji I,

Drs. Sigit Yulianto M.Pd.  
NIP 19630721 198803 1 001

Penguji II,

Drs. Yuli Witanto, M.Pd.  
NIP 19640717 199803 1 002

Penguji III,

Drs. Suhardi, M.Pd  
NIP 19570201 198103 1 006

## PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Bayu Setya Abrori

NIM : 1401415101

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Semarang

Judul : *Implementasi Manajemen Peserta Didik di SDN 2 Brebes  
Kabupaten Brebes*

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Tegal, 17 Juni 2019



Bayu Setya Abrori  
NIM 1401415101

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

1. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika masih muda.  
(Dahlan Iskan)
2. Bila kita pasrah tumbuh rasa damai, dalam damai kita bertemu bahagia. (Ebiet G Ade)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Mukhyiddin dan Ibu Maburriyah, serta adik Muhammad Syaifur Rizal.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Peserta Didik di SD Negeri 2 Brebes Kabupaten Brebes”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin menempuh Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator PGSD UPP Tegal yang telah memberikan izin penelitian di Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Suhardi, M.Pd., dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, menyarankan, dan memotivasi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



6. Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus Tegal Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
7. Tenaga Kependidikan PGSD UPP Tegal yang telah membantu terkait dengan administrasi selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Yusti Puspitawati, S.Pd., M.Pd Kepala SD Negeri 2 Brebes yang telah memberikan izin serta untuk penelitian serta berpartisipasi dalam penelitian.
9. Guru-guru SD Negeri 2 Brebes yang telah berperan dalam membantu dalam penelitian.
10. Teman-teman mahasiswa PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat yang besar atas bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam manajemen sekolah, lebih khusus lagi manajemen peserta didik di sekolah dasar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Tegal, 17 Juni 2019

Penulis

## ABSTRAK

Abrori, Bayu Setya. 2019. *Implementasi Manajemen Peserta Didik di SD Negeri 2 Brebes Kabupaten Brebes*. Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Drs. Suhardi, M.Pd., 222

**Kata Kunci: manajemen pendidikan, manajemen sekolah, manajemen peserta didik, sekolah inklusif.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen peserta didik yang meliputi: (1) penerimaan peserta didik baru di SDN 2 Brebes; (2) pengelompokan peserta didik di SDN 2 Brebes; (3) pembinaan disiplin peserta didik di SDN 2 Brebes; (4) evaluasi peserta didik di SDN 2 Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas dan guru pembimbing khusus sebagai subyek pendukung. Setting penelitian di SDN 2 Brebes Kabupaten Brebes.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan guru kelas. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi, dan member check. Serta teknik analisis datanya menggunakan kualitatif model interaktif Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam penerimaan peserta didik baru, SDN 2 Brebes membatasi peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima hanyalah tipe *slow learner*/lamban belajar saja karena disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang terbatas; (2) peserta didik di SDN 2 Brebes dikelompokkan dalam setting sekolah berdasarkan usia dan urutan abjad. Adapun dalam setting kelas, pengelompokan peserta didik disesuaikan dengan mata pelajaran dan kebutuhan yang ada; (3) pembinaan disiplin di SDN 2 Brebes dilaksanakan secara klasikal seperti upacara bendera dan diluar kegiatan tersebut, wali kelas berperan aktif dalam pembinaan disiplin di kelasnya masing-masing; (4) evaluasi hasil belajar peserta didik di SDN 2 Brebes dilaksanakan dalam beberapa evaluasi seperti ulangan harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Hasil dari evaluasi hasil belajar peserta didik akan dilaporkan dalam bentuk buku rapor yang diserahkan setiap akhir semester.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
BAB 2 .....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Manajemen Sekolah.....	12
2.1.2 Manajemen Peserta Didik .....	14
2.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik .....	24
2.1.4 Pendidikan Inklusif .....	38
2.2 Kajian Empiris .....	47
2.3 Kerangka Berpikir .....	65
BAB 3 .....	67
METODE PENELITIAN.....	67

3.1 Desain Penelitian.....	67
3.2 Tempat dan waktu penelitian .....	68
3.3 Prosedur Penelitian.....	68
3.4 Data dan Sumber Data .....	71
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	72
3.6 Teknik Keabsahan Data .....	75
3.7 Teknik Analisis Data dan Analisis Data .....	80
BAB 4 .....	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	82
4.1 Gambaran Umum SDN 2 Brebes .....	82
4.1.1 Profil Sekolah Dasar Negeri Brebes 02 .....	82
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Dasar Negeri Brebes 02 .....	82
4.1.3 Struktur Organisasi SDN 2 Brebes .....	85
4.1.4 Keadaan Sekolah.....	86
4.2 Temuan Penelitian.....	87
4.2.1 Penerimaan Peserta Didik Baru .....	88
4.2.2 Pengelompokkan Peserta Didik .....	95
4.2.3 Pembinaan Disiplin Peserta Didik .....	100
4.2.4 Evaluasi Peserta Didik .....	105
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	111
4.3.1 Penerimaan Peserta Didik Baru .....	111
4.3.2 Pengelompokkan Peserta Didik .....	120
4.3.3 Pembinaan Disiplin Peserta Didik .....	122
4.3.4 Evaluasi Peserta Didik .....	126
BAB 5 .....	129
PENUTUP.....	129
5.1 Simpulan .....	129
5.2 Implikasi Penelitian.....	131
5.3 Saran.....	131
5.3.1 Bagi dinas pendidikan .....	131
5.3.2 Bagi Sekolah .....	131

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya .....	132
5.4 Rekomendasi Penelitian .....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Faktor Pemengaruh Keberhasilan Pendidikan Inklusif.....	44
4.1 Persebaran Peserta Didik di SDN 2 Brebes .....	86
4.2 Jumlah siswa dalam empat tahun terakhir .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan kerangka berpikir .....	66
3.1 Bagan Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman .....	80
4.1 Bagan Struktur organisasi SDN 2 Brebes .....	85
4.2 Keadaan Sekolah.....	86
4.3 Susunan Panitia PPDB SDN 2 Brebes tahun 2018 .....	88
4.4 Brosur PPDB SDN 2 Brebes.....	91
4.5 Formulir pendaftaran PPDB.....	91
4.6 Pengelompokan peserta didik dalam daftar pesensi.....	96
4.7 Pengelompokan kelas utuh ( <i>full-class grouping</i> ).....	97
4.8 Pengelompokan peserta didik dalam kelas jenis konvensional.....	98
4.9 Guru menenangkan peserta didik.....	100
4.10 Tata Tertib SDN 2 Brebes.....	101
4.11 Peserta didik telambat masuk kelas .....	102
4.12 KKM dalam Laporan tengah semester.....	105
4.13 Jenis evaluasi hasil belajar .....	106
4.14 Contoh laporan penilaian tengah semester.....	107
4.15 Contoh rapor peserta didik .....	107
4.16 Kriteria kenaikan kelas.....	109
4.17 Prosedur penerimaan peserta didik baru .....	111
4.18 Master aplikasi penilaian kurikulum 2013 SD.....	127

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi kisi instrumen.....	139
2. Data Informan dan Materi Wawancara.....	141
3. Data Informan dan Waktu Pengambilan Data .....	142
4. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah .....	143
5. Pedoman Wawancara Guru Kelas Inklusif.....	145
6. Pedoman Wawancara Guru Pembimbing Khusus.....	147
7. Pedoman observasi Implementasi Manajemen Peserta Didik .....	149
8. Pedoman Dokumentasi .....	151
9. Catatan Lapangan .....	153
10. Reduksi Data Penelitian.....	193
11. Kesimpulan Penelitian .....	204
12. Dokumentasi Keadaan Sekolah .....	212
13. SK sekolah inklusif.....	218
14. Data peserta didik berkebutuhan khusus .....	232
15. Dokumentasi wawancara .....	233
16. Catatan kegiatan penelitian.....	235
17. Perizinan penelitian .....	236
18. Keterangan pelaksanaan penelitian.....	239

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraianya sebagai berikut:

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Selain itu, bagi sebuah bangsa pendidikan menjadi alat untuk mengangkat derajat dan kualitas bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan akan selalu berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks tersebut, Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa setiap peserta didik berasal dari beragam latar belakang, baik itu suku, agama, ras, golongan, sosial, atau bahkan fisik sekalipun. Dalam kaitannya dengan hal ini termasuk pula anak yang memiliki keterbatasan atau memiliki kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 tersurat bahwa pendidikan haruslah terselenggara secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada seperti nilai keagamaan, nilai kultural, hak asasi manusia, serta kemajemukan bangsa. Lebih lanjut lagi pada pasal 5 ayat 1 disebutkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang memiliki potensi dan kecerdasan istimewa.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang dimiliki (Mayasari, 2016:7). Anak yang tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus ialah anak yang tidak memiliki ketidakmampuan dari segi fisik, ketidakmampuan organ, retradasi mental, gangguan bicara dan bahasa, retradasi mental, gangguan belajar, *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD), gangguan emosional dan perilaku (Aslan, 2017:107). Ilahi (2013:138), “Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens”. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa lebih spesifik lagi menjelaskan mengenai pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus sebagaimana pada pasal 1 yang menerangkan:

... yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dengan adanya kenyataan bahwa peserta didik berasal dari beragam latar belakang serta memiliki kebutuhan yang tidak sama, maka dibutuhkan manajemen yang baik. Badrudin (2014:3) menjelaskan, “Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lebih khusus lagi, dalam lingkup pendidikan dikenal juga istilah manajemen pendidikan. Fatoni (2015:101) menjelaskan, “Manajemen pendidikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan beberapa sumber terkait dunia pendidikan sehingga dapat difokuskan untuk menuju pada tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan pendidikan yang diharapkan”. Sedangkan manajemen sekolah merupakan penerapan atau aplikasi ilmu manajemen pada bidang persekolahan (Sutomo, 2015:3).

Manajemen dalam bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana sebuah lembaga tersebut di kelola. Setidaknya terdapat tujuh komponen sekolah yang perlu dikelola dengan baik. Komponen tersebut ialah kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan/peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan (Mulyasa dalam Susilo, 2007:50).

Salah satu komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan ialah komponen peserta didik. Imron (2011:6) menjelaskan, “Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik itu masuk sekolah sampai dengan lulus”. Manajemen peserta didik memiliki peran yang sentral dalam pelaksanaan manajemen sekolah. Hal tersebut dikarenakan setiap komponen manajemen sekolah, seperti manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, dan manajemen lainnya dalam lingkup sekolah dikelola sedemikian rupa dan akan diarahkan pada pelayanan peserta didik agar mereka mendapat pelayanan pendidikan sebaik mungkin.

Seperti yang telah diketahui bahwa manajemen peserta didik merupakan manajemen yang berupa pengaturan terhadap peserta didik dari mulai masuk hingga keluar/lulus sekolah. Manajemen peserta didik memiliki ruang lingkup yang meliputi: perencanaan, penerimaan, pengelompokan, kehadiran, pembinaan disiplin, kenaikan kelas dan penjurusan, perpindahan/mutasi, kelulusan dan alumni, kegiatan ekstra kelas, tata laksana manajemen, peranan kepala sekolah, dan pengaturan layanan (Prihatin, 2014:13). Ruang lingkup manajemen peserta didik yang cukup luas itu hendaknya dilaksanakan secara efisien dan efektif oleh satuan pendidikan supaya tujuan-tujuan manajemen peserta didik dapat tercapat dengan baik. Secara khusus tujuan manajemen peserta didik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor, mengembangkan bakat minat, menyalurkan aspirasi demi memenuhi kebutuhan peserta didik, kesejahteraan hidup peserta didik (Badrudin, 2014:24).

Salah satu sekolah dasar yang menerapkan pendidikan berbasis inklusif ialah SDN 2 Brebes, kabupaten Brebes. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilaksanakan di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes, pada tanggal 3 Desember 2018, peneliti mendapat informasi bahwa SD tersebut merupakan salah satu SD yang mendapat mandat di kabupaten Brebes untuk menerapkan pendidikan berbasis inklusif sejak tahun 2009. Dalam implementasinya, pengelolaan SD inklusif tentu berbeda dalam beberapa aspek dengan SD reguler. Terlebih lagi dalam bidang manajemen peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat informasi bahwa tidak ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Padahal dalam Permendiknas RI No 70 tahun 2009 dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan sedikitnya satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Menurut Garnida (2015:86):

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan Khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Hal ini tentu menimbulkan permasalahan yang mendasar jika sebuah sekolah inklusif tidak memiliki guru pembimbing khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan.

Selain permasalahan guru pembimbing khusus, permasalahan lain yang dapat ditemukan pada saat observasi awal ialah pada proses penerimaan peserta

didik. Terkadang masih terdapat kesalahan persepsi dari orang tua calon peserta didik yang ingin menyekolahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah inklusif. Salah satu contohnya ialah pemahaman bahwa sekolah inklusif wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 pasal 3 yang dalam pasal 1 menyebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk mengikuti pendidikan inklusif. Lebih lanjut lagi pada pasal 2 di uraikan bahwa setidaknya terdapat 13 jenis kelainan meliputi: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda. Padahal pada pasal 5 dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri.

Menurut kepala sekolah SDN 2 Brebes, saat ini berdasarkan sumberdaya guru maupun fasilitas yang dimiliki sekolah hanya mampu menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus yang ringan seperti tunalaras atau *slowlearner*. Sedangkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan lainnya perlu untuk mendapat pendidikan yang lebih khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Di sisi lain, apabila Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif lebih dicermati. Pun pemerintah secara tidak langsung menghendaki setiap sekolah, bukan hanya sekolah inklusif untuk menerapkan pendidikan inklusif sesuai kemampuan tiap satuan pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4

ayat 2 yang mengamanatkan, “Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”. Hal ini berarti setiap sekolah selain sekolah inklusif memiliki hak untuk melaksanakan pendidikan inklusif apabila berkenan. Namun tentu sekolah tersebut perlu untuk mengkaji berbagai hal terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Salah satunya ialah sekolah perlu mengkaji mengenai manajemen peserta didik di sekolah inklusif.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut. Peneliti berupaya untuk melaksanakan penelitian mengenai manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes supaya peneliti dapat memberi masukan yang membangun bagi Sekolah Dasar ini.

Berdasarkan masalah yang telah peneliti uraikan, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Hamzah (2017) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SDN No. 52 Lerekang Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa: proses penerimaan peserta didik baru pada SDN No. 52 Lerekang sudah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Takalar; Permasalahan manajemen kesiswaan yang didapatkan antara lain pencatatan dan pelaporan kesiswaan khususnya dalam buku induk tidak diisi data siswa secara lengkap; tidak semua guru melakukan presensi kepada siswa; kurangnya pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru; layanan perpustakaan di sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal; fasilitas juga kurang memadai sehingga tidak pernah digunakan untuk proses pembelajaran.

Ada pula penelitian yang dilaksanakan oleh Ristanta, A (2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Manajemen Kesiswaan di SD Negeri Puluhan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pada SD tersebut: (1) pencatatan dan pelaporan kesiswaan khususnya dalam buku induk tidak diisi data siswa secara lengkap dan tidak semua guru melakukan presensi siswa, (2) kurangnya pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru, dan (3) layanan perpustakaan di sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal, fasilitas juga kurang memadai sehingga tidak pernah digunakan untuk proses pembelajaran.

Selain kedua penelitian sebelumnya, terdapat pula penelitian yang dilaksanakan oleh Ardana H.R. (2014) Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama PGRI Kecamatan Kasihan*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa: (1) Peserta didik berkebutuhan khusus mendapat keutamaan dalam bidang analisis kebutuhan jika dibandingkan dengan peserta didik normal. Selain itu terdapat syarat khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam administrasi pendaftaran yakni melampirkan bukti hasil assesmen; (2) Peserta didik berkebutuhan khusus mendapat perhatian dan pendampingan yang lebih jika dibandingkan dengan peserta didik normal. Peserta didik normal (tanpa kebutuhan khusus) ikut membantu proses pembinaan peserta didik berkebutuhan khusus terutama dalam peningkatan motivasi dan tingkat kepercayaan diri; (3) Dalam evaluasi pembelajaran, tidak terdapat perbedaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal dalam hal indikator penilaian dan kriteria ketuntasan



minimalnya pun sama serta tentunya sama dalam hal proses penilaian. Perbedaan yang ada hanyalah pada pemaknaan nilai yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal; (4) Dalam hal mutasi, peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kebebasan untuk berpindah rombel sesuai dengan ketentuan, namun untuk mutasi ekstern peserta didik berkebutuhan khusus perlu untuk melampirkan bukti hasil assesmen.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Peserta Didik di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerimaan peserta didik di SDN 2 Brebes?
- 2) Bagaimana pengelompokan peserta didik di SDN 2 Brebes?
- 3) Bagaimana pembinaan disiplin peserta didik di SDN 2 Brebes?
- 4) Bagaimana evaluasi hasil belajar peserta didik di SDN 2 Brebes?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Mendeskripsikan secara umum proses manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan bagaimana penerimaan peserta didik di SDN 2 Brebes
- 2) Mendeskripsikan bagaimana pengelompokan peserta didik di SDN 2 Brebes
- 3) Mendeskripsikan bagaimana pembinaan disiplin peserta didik di SDN 2 Brebes
- 4) Mendeskripsikan bagaimana evaluasi peserta didik di SDN 2 Brebes

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai manajemen peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 2 Brebes.
- 2) Menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

### ***1.5.2.1 Dinas Pendidikan***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan manajemen peserta didik di Sekolah Dasar.

### ***1.5.2.2 Sekolah***

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Sekolah Dasar Negeri 2 Brebes sebagai informasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah, terutama dalam manajemen peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 2 Brebes, agar dapat terus berjalan secara efektif dan efisien.

### ***1.5.2.3 Peneliti***

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan manajemen peserta didik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka berisi kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang mendasari penelitian. Teori, temuan, dan bahan penelitian digunakan sebagai acuan peneliti untuk dijadikan landasan dalam mengatasi masalah dalam penelitian. Kajian teori dan kajian empiris digunakan untuk menyusun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

#### **2.1 Kajian Teoritis**

Pada kajian teori akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: a. Manajemen sekolah, b. Manajemen peserta didik; c. Ruang lingkup manajemen peserta didik; d. Pendidikan inklusif.

##### **2.1.1 Manajemen Sekolah**

Istilah manajemen sekolah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan sekolah. Secara etimologi manajemen atau dalam bahasa inggrisnya *management* berasal dari bahasa latin yaitu "*manus*" yang berarti "*to control by hand*" atau "*gain result*" yang berarti mengendalikan dengan tangan atau mendapatkan hasil. Kata manajemen/*management* ini dapat pula berasal dari padanan kata dalam bahasa Italia yaitu *manegiarre* yang memiliki arti "mengendalikan" (Sutomo dan Prihatin, 2015:1). Sedangkan menurut Echols dan Shadily dalam Susilo (2008:71) manajemen terbentuk dari kata dalam bahasa inggris yakni "to manage" yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan atau mengelola. Badrudin (2014:3) sendiri menyimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama

para anggota organisasi dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan sekolah sendiri merupakan tempat berlangsungnya pendidikan secara formal.

Beberapa ahli menggunakan istilah administrasi sebagai padanan kata dari manajemen. Sungkawa dalam Susilo (2008:72) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan memiliki ide atau pengertian yang sejajar dengan manajemen pendidikan. Sedangkan Sutomo (2015:1) menerangkan secara lebih spesifik bahwa pada hakikatnya, administrasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding dengan manajemen. Kendati demikian keduanya itu memiliki penekanan makna bahwa hasil/keuntungan yang besar harus didapatkan melalui kerja secara efektif dan efisien.

Manajemen sekolah menurut Abdulmuid (2013:15) adalah “Suatu upaya memberdayakan sumber daya yang ada, baik manusia maupun alam melalui proses sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan diterapkan dalam bidang pendidikan”. Imron (1998:16) menjelaskan manajemen sekolah sebagai, “Penataan dengan mendayagunakan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia guna mencapai tujuan sekolah”. Sedangkan Susilo (2008:72) menjelaskan, “Manajemen sekolah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumberdaya pendidikan dengan maksud untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil simpulan bahwa manajemen sekolah adalah setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya baik itu sumberdaya

manusia maupun sumberdaya non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada suatu sekolah.

Salah satu hal yang penting dalam manajemen sekolah adalah bagaimana implementasi sekolah dalam melaksanakan manajemen komponen-komponen yang ada pada sekolah itu sendiri. Fauzan (2016:95) menuturkan bahwa manajemen sekolah meliputi manajemen kesiswaan (peserta didik), manajemen kurikulum, manajemen personil sekolah, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan dan manajemen layanan khusus. Sedangkan Sutomo (2015:43) menuturkan bahwa komponen manajemen sekolah meliputi kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan/peserta didik, keuangan, sarana prasarana, pengelolaan hubungan, sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus. Sufyrama dalam Susilo (2008:73-74) menjabarkan bahwa bidang garapan sekolah mencakup pengajaran dari kurikulum, murid/peserta didik, kepemimpinan masyarakat sekolah, personil sekolah, gedung sekolah, angkutan sekolah, organisasi dan struktur, serta keuangan sekolah.

## **2.1.2 Manajemen Peserta Didik**

### ***2.1.2.1 Pengertian Manajemen Peserta Didik***

Manajemen sekolah memiliki beberapa komponen yang salah satunya adalah manajemen peserta didik. Para ahli memiliki beberapa penyebutan yang berbeda pada salah satu komponen manajemen sekolah ini. Prihatin (2014:4), Imron (2011:6) dan Badrudin (2014:16) menyebutnya dengan istilah manajemen peserta didik. Sedangkan Kisbiyanto (2012:5), Hufron (2016:95), Suprpto (2017:185), dan Fauzan (2016:94) menggunakan istilah manajemen kesiswaan.

Dalam bahasa Inggris, istilah manajemen peserta didik/manajemen kesiswaan disebut sebagai *pupil personnel administration* oleh Knezevich (Prihatin, 2014:4) atau dapat disebut pula sebagai *student personnel management* oleh Nwapka (2015:62). Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan istilah yang dikemukakan para ahli namun setiap istilah tersebut memiliki gagasan/konsep yang sama.

Manajemen Peserta Didik terdiri dari kata “Manajemen” dan frasa “Peserta Didik”. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yakni “to manage” yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan atau mengelola. Sedangkan peserta didik memiliki definisi yang telah dijelaskan secara jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 4: “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Pengertian manajemen peserta didik menurut Knezevich dalam Imron (2011:6) adalah “Layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas ... sampai ia matang di sekolah”. Paul Nwapka (2015:62) menyatakan, “Students’ personnel management refers to all the activities that are carried out by the school administrator to ensure that the students derive the best from the schools curricular and co-curricular activities”. Prihatin (2014:4) mendefinisikan “Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah”. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa



manajemen peserta didik adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola sekolah dalam melayani peserta didik mulai dari perencanaan, pendaftaran, penerimaan, pelayanan, pembinaan baik itu di dalam maupun di luar kelas, hingga peserta didik tersebut lulus dari sekolah.

### ***2.1.2.2 Landasan Manajemen Peserta Didik***

Dasar hukum mengenai manajemen peserta didik dapat dijabarkan dalam beberapa undang-undang:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia keempat yang mengamanatkan bahwasanya pemerintah Negara Indonesia hendaknya dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta dalam kaitannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada UUD 1945 pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya hak, namun pada ayat kedua di pasal yang sama, dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Selain itu pemerintah juga harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Kemudian secara terperinci dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1); (2) Setiap warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus (pasal 5 ayat 4); (3) Setiap warga negara

berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 5); (4) Pasal 6 ayat 1 mengamanatkan mengenai usia peserta didik yang wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni pada usia tujuh sampai dengan lima belas tahun; (5) Pasal 6 ayat 2 mengamanatkan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab setiap warga negara; (6) Pasal 12 ayat 1 menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki peserta didik: Mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik; Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; Mendapatkan beasiswa apabila peserta didik berprestasi sedangkan orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; Mendapatkan biaya pendidikan apabila orangtua peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya; Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu; (7) Pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan kewajiban yang dimiliki oleh peserta didik: Menjamin keberlangsungan proses pendidikan dengan cara menjaga norma-norma pendidikan; Ikut serta dalam menanggung pembiayaan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang mengamanatkan bahwa: (1) Usia minimal untuk dapat diterima di Sekolah Dasar ialah enam tahun (pasal 15 ayat 1); (2) Salah satu syarat wajib untuk dapat diterima di Sekolah Lanjutan Pertama/Sederajat ialah harus sudah tamat dari Sekolah Dasar/satuan pendidikan yang sederajat; (3) Siswa

memiliki hak untuk: mendapat perlakuan sesuai bakat, kemampuan dan minat; memperoleh pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik tersebut; mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, sesuai dengan bakat minat, kemampuan dan mendapat pengakuan atas tingkat pendidikan tertentu; mendapatkan bantuan berupa fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan-bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku; mendapat hasil evaluasi belajar; dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari ketentuan awal sesuai dengan peraturan yang berlaku; berhak untuk mendapat pelayanan khusus apabila peserta didik mengalami kecacatan tertentu; (4) Siswa memiliki kewajiban untuk: ikut serta dalam pembiayaan pendidikan kecuali peserta didik yang dibebaskan dari keewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; patuh dengan peraturan yang berlaku; menghormati tenaga kependidikan; ikut serta dalam pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah serta dalam memelihara sarana prasarana sekolah terkait.

### ***2.1.2.3 Prinsip Manajemen Peserta Didik***

Seperti yang telah penulis uraikan pada poin sebelumnya, bahwa manajemen peserta didik berfungsi sebagai fasilitator peserta didik dalam mengembangkan diri dari dimensi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, serta dimensi-dimensi lain agar proses pembelajaran berlangsung dengan tertib, teratur dan lancar. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sebagai berikut: (1) Manajemen peserta didik haruslah sejalan dengan tujuan manajemen sekolah, hal

ini karena manajemen peserta didik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen sekolah itu sendiri; (2) Seluruh kegiatan manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan haruslah dalam rangka mendidik peserta didik, bukan untuk kepentingan-kepentingan diluar misi pendidikan; (3) Seluruh kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat membuat para peserta didik yang berasal dari latar belakang yang beda-beda menjadi satu kesatuan sosial yang solid; (4) Manajemen peserta didik hendaknya dipandang sebagai pengelolaan pembimbingan peserta didik. Pembimbingan akan berlangsung dengan optimal apabila subyek yang dibimbing bersedia dengan lapang dada untuk dibimbing. Dalam hal ini subyek yang dimaksud adalah peserta didik; (5) Setiap kegiatan manajemen peserta didik hendaknya dapat memupuk sifat kemandirian dalam diri tiap-tiap peserta didik. Hal ini tentunya tidak berlangsung secara instan. Diharapkan sedikit demi sedikit sifat kemandirian siswa akan muncul dari kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik secara bertahap; (6) Hasil dari kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi aspek kehidupan peserta didik itu sendiri, baik itu kehidupannya di sekolah, masyarakat, masa kini dan masa depan (Imron, 2011:13).

#### ***2.1.2.4 Tujuan Manajemen Peserta Didik***

Secara umum, Manajemen peserta didik memiliki tujuan untuk mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan agar dapat menunjang proses pembelajaran dan dapat ikut serta dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan secara efektif dan efisien (Badrudin, 2014:24). Menurut Mulyasa dalam Nafia (2014:76) mengungkapkan bahwa manajemen peserta didik memiliki tujuan dalam rangka mengelola beragam kegiatan dalam bidang

kesiswaan supaya kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan supaya dapat berjalan secara lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Sebagai salah satu ruang lingkup dari manajemen sekolah, Prihatin (2014:9) menjabarkan bahwa manajemen peserta didik memiliki tujuan khusus: (1) Mengasah ketiga ranah pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik; (2) Sebagai sarana penyaluran dan pengembangan bakat dan minat serta kemampuan umum peserta didik; (3) Sebagai sarana penyaluran aspirasi, keinginan dan juga pemenuhan kebutuhan peserta didik. Tujuan yang pertama mengarahkan supaya peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan, baik itu tujuan pendidikan yang ada di sekolah maupun tujuan pendidikan nasional. Tujuan manajemen peserta didik yang kedua mengarahkan agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat minat serta kemampuan mereka meskipun itu diluar bidang akademik. Tujuan manajemen peserta didik yang ketiga diharapkan dapat membuat siswa terpenuhi kebutuhannya dalam lingkup sekolah sehingga mereka dapat berkembang secara baik dan optimal. Kemudian dengan terpenuhinya seluruh tujuan manajemen peserta didik tersebut, diharapkan para peserta didik akan mendapatkan kesejahteraan pada satuan pendidikan (sekolah), sehingga mereka dapat menempuh pendidikan dan cita-citanya.

Dalam kaitannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen peserta didik setidaknya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Lebih lanjut lagi, Sutisna dalam Mulyasa (2000) menyatakan bahwa dalam pengelolaan (manajemen) peserta didik kepala sekolah memiliki

tanggung jawab dalam hal-hal sebagai berupa: (1) Kehadiran peserta didik dan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut; (2) Proses penerimaan, orientasi, pengelompokan dan penjurusan; (3) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar; 4) Program pengawasan bagi peserta didik berkebutuhan khusus; (5) Kontrol kedisiplinan murid; (6) Program bimbingan dan penyuluhan; (7) Program kesehatan dan keamanan; (8) Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional (Susilo, 2008:59-60).

#### ***2.1.2.5 Pendekatan Manajemen Peserta Didik***

Dalam manajemen peserta didik, terdapat setidaknya dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan kuantitatif (*the quantitative approach*) dan pendekatan kualitatif (*the qualitative approach*). Pada pendekatan kuantitatif, peserta didik dituntut untuk memenuhi tuntutan-tuntutan lembaga yang lebih bersifat birokratik dan administratif. Asumsi pendekatan ini ialah apabila peserta didik dapat memenuhi tugas-tugas, harapan, ataupun tuntutan lembaga maka peserta didik akan menjadi matang dan mencapai keinginannya.

Secara operasional, pendekatan kualitatif ini dapat mewajibkan: (1) Kehadiran peserta didik secara mutlak; (2) Memperketat presensi; (3) Penuntutan disiplin yang tinggi; (4) Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara tepat waktu (Yeager dalam Imron, 2011:15). Secara keseluruhan pendekatan ini memberikan beban pada peserta didik dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan. Namun hal tersebut akan relevan apabila dipandang sebagai sarana mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata yang tentunya memiliki tuntutan-tuntutan yang beragam.

Kedua, pendekatan kualitatif atau *the qualitative approach*. Pendekatan ini memiliki titik berat pada kesejahteraan peserta didik. Apabila dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang mengasumsikan jika peserta didik mampu maka ia akan matang, pada pendekatan ini asumsi diarahkan agar peserta didik senang dan sejahtera terlebih dahulu. Apabila peserta didik senang/sejahtera dengan diciptakannya lingkungan yang kondusif serta iklim pendidikan yang mendukung, maka mereka akan dapat belajar dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki secara lebih optimal (Prihatin, 2014:12).

Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan kuantitatif dipandang lebih terukur dalam pencapaian target dan tujuannya namun memberikan beban kepada peserta didik secara lebih berat. Pendekatan kualitatif dipandang lebih manusiawi dan mengimplementasikan prinsip bahwa peserta didik adalah subyek pendidikan. Tentunya agar lebih optimal dalam dunia pendidikan, kedua pendekatan ini dapat disatukan agar menjadi pendekatan padu (Badrudin, 2014:28).

Dalam pendekatan padu, peserta didik tetap memiliki tuntutan-tuntutan dari lembaga yang bersifat birokratik dan administratif, namun di sisi lain sekolah juga harus memberikan timbal balik berupa penyediaan fasilitas dan membangun iklim sekolah yang kondusif bagi perkembangan potensi para peserta didik. Berdasarkan rumusan pendekatan padu dalam manajemen peserta didik tersebut, maka dapat dibangun asumsi bahwa penyediaan iklim sekolah yang kondusif, kesejahteraan peserta didik, dan pelayanan yang optimal merupakan usaha-usaha untuk mendisiplinkan peserta didik dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan lembaga.



### ***2.1.2.6 Fungsi Manajemen Peserta Didik***

Secara umum, manajemen peserta didik berfungsi untuk fasilitator peserta didik untuk berkembang dari dimensi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan dan juga dimensi-dimensi potensi yang dimiliki oleh para peserta didik itu sendiri (Prihatin, 2014:9). Adapun secara khusus, fungsi manajemen peserta didik dapat dirumuskan kedalam empat poin.

Fungsi yang pertama ialah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yakni fungsi untuk memberi wahana kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang dari segi individualitasnya meliputi kemampuan umum/kecerdasan, kemampuan khusus/bakat, ataupun kemampuan-kemampuan lainnya dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul.

Kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi yang kedua ini adalah fungsi yang berkaitan dengan hakikat bahwa peserta didik merupakan makhluk sosial. Adapun fungsi ini memfasilitasi siswa untuk dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya, keluarga, orang tua, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini menghendaki bahwa manajemen peserta didik haruslah dapat menjadi fasilitas penyaluran hobi, kesenangan, bakat dan minat peserta didik. Jika hal ini terwujud diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Terakhir merupakan fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik adalah agar peserta didik dapat sejahtera dalam proses

perkembangannya di sekolah maupun di masyarakat. Diharapkan apabila seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan ikut memikirkan kesejahteraan teman sebayanya (Badrudin, 2014:25).

### **2.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik**

Seperti yang telah diketahui bahwa manajemen merupakan usaha-usaha pengelolaan peserta didik mulai dari mereka masuk sampai dengan lulus dari satuan pendidikan tertentu yang pengelolaannya meliputi yang berkenaan langsung dengan peserta didik ataupun pengelolaan yang tidak berkenaan secara langsung dengan peserta didik. Dalam pengelolaan yang sedemikian rupa, manajemen memiliki ruang lingkup yang dapat dirinci sebagai berikut:

#### ***2.1.3.1 Perencanaan peserta didik***

Imron (2011:21) memberikan definisi mengenai perencanaan peserta didik dalam manajemen peserta didik berbasis sekolah, yakni “Perencanaan peserta didik ialah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah”. Dalam pengertian tersebut, perlu diperhatikan bahwa kata “muka” merujuk pada dimensi waktu. Dimensi aktivitasnya adalah “perencanaan” dan hasil dari aktivitas tersebut adalah rancangan yang berbentuk rumusan tertulis, sehingga apabila rancangan/rencana tertulis belum ada maka aktivitas perencanaan peserta didik ini belumlah selesai (Prihatin, 2014:16).

Perencanaan peserta didik adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen peserta didik karena ia merupakan langkah pertama dalam rangkaian

proses manajemen peserta didik. Secara formal, perencanaan peserta didik berada dibawah tanggungjawab kepala sekolah sama seperti manajemen peserta didik, namun secara material tanggungjawab ini berada di tangan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan/peserta didik (Imron, 2011:20). Namun jika di satuan pendidikan tertentu yang tidak mengenal jabatan wakil kepala seperti di sekolah sekolah dasar maka manajemen peseta didik (termasuk perencanaan peserta didik) akan berada dibawah tanggungjawab guru dengan tugas tambahan. Batasan dari perencanaan peserta didik meliputi penerimaan peserta didik baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Perencanaan ini juga berkaitan dengan kegiatan penerimaan, pencatatan data pribadi peserta didik, data hasil belajar peserta didik, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan kulikuler dan kokulikuler.

#### ***2.1.3.1.1 Langkah-langkah perencanaan peserta didik***

Dalam perencanaan peserta didik, ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan, meliputi: Perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, pemrograman, langkah-langkah, penjadwalan, pembiayaan (Imron, 2011:22). Langkah-langkah tersebut hendaknya dilaksanakan secara berurutan. Yang pertama perkiraan (*forecasting*) adalah menyusun rencana secara garis besar. Perkiraan ini disusun dengan mempertimbangkan tiga dasar, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertimbangan atas dasar masa lalu adalah belajar dari pengalaman yang telah terjadi, bagaimana sebuah perencanaan terlaksana dengan situasi di saat lampau untuk dipertimbangkan sebagai rencana masa sekarang. Pertimbangan atas dasar masa kini ialah untuk mempertimbangkan keadaan, situasi, atau kondisi masa kini apakah suatu perencanaan masih relevan atau tidak. Pertimbangan atas dasar masa

depan ialah dengan memprediksi apakah perencanaan peserta didik dapat membuat *output* para peserta didik dapat menghadapi dunia yang sesungguhnya (Prihatin, 2014:18).

Kedua, perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dituju baik itu oleh sekolah, individu, civitas akademika, peserta didik, guru atau bahkan orang tua peserta didik. Tujuan hanyalah bersifat “dapat dituju” maksudnya ia bukanlah merupakan sesuatu yang konkret sehingga sulit untuk dapat dicapai. Agar sebuah tujuan dapat dicapai, maka tujuan-tujuan itu akan dijabarkan lagi dalam bentuk target-target yang dapat diukur ketercapaiannya (Imron, 2011:25).

Ketiga, kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan ialah proses pengidentifikasian segala kegiatan yang dapat membantu atau menunjang keberhasilan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Identifikasi kegiatan haruslah dilaksanakan secara cermat dan sebanyak mungkin. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan berbanding lurus dengan representasi kegiatan atas capaian target (Prihatin, 2014:18).

Keempat, pemograman (penyusunan program). Aktivitas ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (kebijakan) yang berupa pemilahan kegiatan yang telah diidentifikasi pada langkah kebijakan. Adapun beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi ialah: kontribusi kegiatan terhadap proses dalam mencapai target, mempertimbangkan korelasi sumberdaya dengan kegiatan terkait, waktu pelaksanaan kegiatan dan antisipasi atas hambatan yang mungkin terjadi (Prihatin, 2014:19).

Langkah berikutnya dalam perencanaan peserta didik ialah menentukan urutan langkah-langkah atau tahapan kegiatan dengan menentukan skala prioritas. Lalu langkah-langkah tersebut diperinci melalui penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan. Lalu yang terakhir ialah pembiayaan yang pelaksanaannya meliputi perincian biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan sumbernya (Imron, 2011:28).

#### **2.1.3.1.2 Sensus sekolah**

Sensus sekolah (*school census*) menurut Prihatin (2014:19) adalah “Suatu aktivitas yang bermaksud mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah tertentu yang dari data tersebut dapat digunakan untuk merencanakan layanan peserta didik”. Dalam pelaksanaan sensus sekolah, terdapat tiga data yang dikumpulkan, yakni data identitas diri anak, identitas orang tua dan keterangan tentang lingkungan anak. Hasil dari sensus ini akan berguna untuk memperkirakan animo peserta didik yang akan masuk pada satuan pendidikan di daerah terkait, animo peserta didik yang akan masuk di jurusan tertentu (pada pendidikan menengah), tingkat kemampuan calon peserta didik.

Imron (2011:34) menyatakan bahwa selama ini sensus sekolah masih belum pernah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ataupun oleh negara. Negara hanya melaksanakan sensus penduduk secara umum. Dengan pertimbangan bahwa sensus penduduk secara umum dilaksanakan dalam waktu yang panjang dan periode pelaksanaannya yang cukup lama, maka perencanaan peserta didik dapat menggunakan prediksi. Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan jumlah peserta didik di tahun-tahun sebelumnya.

### **2.1.3.1.3 Analisis kebutuhan peserta didik**

Analisis kebutuhan peserta didik merupakan kegiatan penentuan bagaimana peserta didik yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, hal ini meliputi: (1) perencanaan peserta didik yang akan diterima atas pertimbangan *class size* atau perbandingan jumlah peserta didik dan jumlah kelas atau daya tampung kelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 24 yang mengamanatkan “Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik...”. Selain itu perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru juga perlu untuk dipertimbangkan. Perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru yang ideal adalah 30:1; (2) Merancang program kegiatan peserta didik selama dididik di sekolah yang berdasar kepada visi dan misi satuan pendidikan, bakat minat peserta didik, sarana prasarana satuan pendidikan, anggaran yang tersedia, serta tentunya tenaga kependidikan yang tersedia (Badrudin, 2014:32).

### **2.1.3.1.4 Ukuran sekolah dan kelas**

Berdasarkan sensus sekolah atau prediksi, dapat diketahui mengenai *school size* atau ukuran sekolah. *School size* adalah perbandingan antara jumlah peserta didik di suatu daerah dengan jumlah sekolah yang berada pada daerah tersebut. Perbandingan dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$SS = \frac{JP}{JS}$$

Keterangan:

SS : *School Size*

JP : Jumlah peserta didik

JS : Jumlah sekolah

Setelah didapatkan mengenai *school size*, dapat dihitung mengenai *class size* atau ukuran kelas. *Class size* adalah perbandingan keseluruhan jumlah kelas/rombongan belajar dengan jumlah peserta didik di suatu daerah.

Perbandingan ini dapat diukur melalui rumus berikut:

$$CS = \frac{JP}{JK}$$

Keterangan:

CS : *Class size*

JP : Jumlah peserta didik

JK : Jumlah kelas

### **2.1.3.2 *Penerimaan peserta didik***

#### **2.1.3.2.1 *Kebijakan penerimaan peserta didik***

Penerimaan peserta didik merupakan salah satu bidang garapan manajemen peserta didik yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penerimaan peserta didik akan menentukan bagaimana calon peserta didik akan diterima di sebuah satuan pendidikan. Meskipun dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada pengecualian, namun tidak serta merta mereka dapat diterima di suatu satuan pendidikan, melalui adanya persyaratan tertentu mengenai penerimaan peserta didik baru ini hendaknya

dilaksanakan secara terorganisir dan terencana secara sistematis, sehingga penerimaan peserta didik baru memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga pendidikan (Pramachintya, 2015:56).

Secara operasional, kebijakan penerimaan peserta didik baru mengatur tentang jumlah peserta didik yang dapat diterima dalam satu periode. Jumlah peserta didik yang akan diterima pada suatu periode tersebut juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi sekolah, seperti anggaran sekolah, daya tampung kelas, jumlah guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana yang tersedia, dan kriteria peserta didik yang akan diterima (Prihatin, 2014:52). Kebijakan penerimaan peserta didik juga dibuat atas dasar arahan dinas pendidikan kota/kabupaten, seperti di kabupaten Brebes yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan.

#### ***2.1.3.2.2 Sistem penerimaan peserta didik baru***

Sistem penerimaan peserta didik dapat juga dimaknai sebagai cara penerimaan peserta didik. Imron (2011:43) mengategorikan sistem penerimaan peserta didik ke dalam dua jenis, yakni sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi ialah penerimaan peserta didik tanpa adanya seleksi sehingga setiap calon peserta didik yang diterima pasti akan diterima. Hal ini dapat terjadi apabila terjadi sebuah sekolah kekurangan jumlah pendaftar.

Kedua, sistem penerimaan peserta didik melalui seleksi. Sistem seleksi ini dapat dibagi menjadi tiga jenis seleksi, yakni Ujian Akhir Nasional (UAN), penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan seleksi berdasarkan tes masuk (Prihatin 2011:53). Lazimnya ketiga seleksi tersebut dapat dilaksanakan di sekolah



menengah, namun berbeda halnya dengan sekolah dasar yang tentu tidak dapat melaksanakan seleksi seperti demikian. Sebagai gantinya pendaftaran sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan seleksi administratif dan ditutup jika daya tampung telah terpenuhi.

#### **2.1.3.2.3 *Prosedur penerimaan peserta didik baru***

Penerimaan peserta didik sesungguhnya merupakan proses pencarian dan penentuan peserta didik baru yang akan dididik di sebuah sekolah. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru secara garis besar menurut Badrudin (2014:32) adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan panitia penerimaan; (2) Penentuan syarat pendaftaran peserta didik baru; (3) Penyediaan formulir pendaftaran; (4) Pengumuman penerimaan peserta didik baru; (5) Penyediaan buku pendaftaran; (6) Penentuan waktu pendaftaran.

#### **2.1.3.3 *Pengelompokan peserta didik***

Setelah peserta didik diterima di suatu sekolah, perlu dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian. Secara garis besar, Mitchun dalam Prihatin (2014:70) menjabarkan dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu *ability grouping* dan *sub-grouping with in the class*. *Ability grouping* berarti bahwa peserta didik dikelompokkan kedalam kelas-kelas yang ada dalam setting sekolah. Sedangkan *sub-grouping with in the class* ialah pengelompokan peserta didik kedalam kelompok yang lebih kecil dalam setting kelas.

Adapun pengelompokan peserta didik dalam setting kelas memiliki beberapa jenis kelompok seperti: *interest grouping*, *special need-grouping*, *team grouping*, *tutorial grouping*, *research grouping*, *full-class grouping*, dan *combined-*

*class grouping* (Prihatin, 2014:72). *Interest grouping* atau pengelompokan berdasar minat ialah pengelompokan yang didasarkan pada minat peserta didik. Peserta didik yang tertarik atas tema, kegiatan, pokok bahasan, atau topik tertentu dapat disatukan dalam sebuah kelompok kecil. *Special need-grouping* atau pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan khusus ialah kelompok kecil yang terbentuk atas dasar kebutuhan khusus tertentu. *Team grouping* atau pengelompokan beregu ialah pengelompokan peserta didik berdasarkan kesamaan minat beberapa peserta didik yang ingin belajar bersama dalam memecahkan kasus tertentu.

*Tutorial grouping* atau pengelompokan tutorial ialah kelompok kecil dalam kelas yang memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat berbeda antar kelompok, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut haruslah melalui persetujuan guru. *Research grouping* atau pengelompokan peserta didik dengan tujuan mengaji topik tertentu dan selanjutnya ditampilkan dalam presentasi di kelas. *Full-class grouping* atau pengelompokan kelas utuh ialah pengelompokan peserta didik secara bersama-sama untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni. *Combined-class grouping* atau pengelompokan beberapa kelas yang berbeda untuk menyaksikan sesuatu seperti film dokumenter, presentasi, pertunjukan seni secara bersama-sama.

Menurut Jeager dalam Badrudin (2014:40) dasar pengelompokan peserta didik ada dua, yakni fungsi integrasi dan fungsi perbedaan. Fungsi integrasi yakni pengelompokan peserta didik yang berdasar kepada persamaan-persamaan yang

dimiliki para peserta didik seperti kelompok usia dan jenis kelamin. Sebagai implikasinya, pengelompokkan dengan cara ini akan menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Fungsi perbedaan ialah pengelompokkan peserta didik yang berdasar kepada perbedaan-perbedaan yang dimiliki para peserta didik seperti perbedaan bakat, minat, dan kemampuan. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi perbedaan akan menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual.

Dalam realitas dunia pendidikan, perlu dicermati bahwa masing-masing peserta didik di samping memiliki persamaan, namun juga memiliki perbedaan. Jika hanya mempertimbangkan persamaan peserta didik, maka akan tercipta pembelajaran klasikal yang bersifat mutlak. Padahal salah satu tujuan pendidikan ialah untuk mengembangkan potensi masing-masing individu. Namun apabila dalam proses pendidikan hanya memperhatikan perbedaan masing-masing peserta didik saja tentu akan sulit karena sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan terbatas pula. Maka sistem pengelompokkan peserta didik ini dapat dipandang sebagai konvergensi antara pengajaran sistem individual dan sistem klasikal (Imron, 2011:96).

#### ***2.1.3.4 Pembinaan disiplin peserta didik/pembinaan kesiswaan***

Pembinaan peserta didik/pembinaan kesiswaan merupakan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang bertugas di setiap satuan pendidikan. Meskipun demikian, Badrudin (2014:49-50) mengemukakan bahwa pembinaan kesiswaan merupakan tanggungjawab seluruh tenaga kependidikan. Terlebih bagi seorang guru yang berada dalam garis paling depan dalam pendidikan. Guru memiliki tugas dalam bukan hanya dalam mengajar peserta

didik, namun juga membimbing serta melatih peserta didik secara berkala supaya para mereka dapat berkembang secara optimal dari segi kompetensi dan seluruh aspek pribadinya. Atas dasar pemikiran tersebut maka dirancanglah standar-standar kompetensi guru dalam bidang pembinaan kesiswaan yang meliputi enam hal.

Adapun keenam standar kompetensi guru dalam bidang pembinaan kesiswaan tersebut ialah: (1) Kompetensi guru dalam memahami perkembangan peserta didik yang meliputi pemahaman karakteristik perkembangan peserta didik, perkembangan fisik dan psikomotorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan intelektual, bakat, minat, perkembangan kreativitas. Adapun indikator dalam kompetensi tersebut adalah adanya pembinaan yang memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam hal: tahap-tahap perkembangan peserta didik, pemahaman gejala perubahan fisik dan perilaku motorik, kehidupan sosial emosional berkelompok, prestasi akademis dan non akademis, dan orisinalitas dan fleksibilitas pembaharuan; (2) Kompetensi guru dalam memahami ruang lingkup pembinaan kesiswaan yang meliputi pemahaman guru dalam lingkup pembinaan: ketakwaan kepada Tuhan YME, kepribadian dan budi pekerti, kepemimpinan, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan, kualitas jasmani dan kesehatan, seni budaya, dan pendidikan pendahuluan bela negara dan wawasan kebangsaan; (3) Mampu merancang dan melaksanakan strategi pembinaan kesiswaan yang meliputi: Merancang strategi pelaksanaan pembinaan kesiswaan, merancang kegiatan ekstrakurikuler, merancang kegiatan ekstrakurikuler melalui latihan terprogram, menciptakan kegiatan kompetisi; (4) Mampu mengembangkan kegiatan pembinaan kesiswaan yang meliputi pengembangan jenis-jenis kegiatan

pembinaan kesiswaan; (5) Mampu merancang dan mengembangkan evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan yang meliputi: memahami konsep dasar dan jenis evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan dan mampu merancang instrumen evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan; (6) Profesionalitas pribadi pembina kesiswaan yang meliputi pribadi yang profesional dan terintegrasi (Badrudin 2014:50-52).

Pelaksanaan pembinaan disiplin peserta didik merupakan salah satu bidang garapan manajemen peserta didik yang setidaknya terdapat empat hal yang dapat dianalisis, yakni disiplin kelas, proses pengembangan disiplin kelas, penanggulangan pelanggaran disiplin, dan pembentukan disiplin sekolah (Prihatin, 2014:93). Disiplin kelas meliputi pelaksanaan tata tertib sehingga terciptanya kondisi kedisiplinan peserta didik di dalam kelas. Dalam pelaksanaannya, penegakan disiplin kelas tidaklah bertujuan untuk mengekang peserta didik atau bahkan mengurangi hak-hak yang dimilikinya. Perlu diingat bahwa setiap hak-hak yang dimiliki oleh peserta didik terbatas oleh hak-hak yang dimiliki oleh peserta didik lainnya.

Dalam rangka untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik dalam kelas, ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan, yakni: (1) Perencanaan disiplin kelas, yang di dalamnya meliputi pembuatan aturan, prosedur, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran; (2) Mengajarkan kepada peserta didik mengenai bagaimana mengikuti peraturan. Hal ini berkaitan dengan masa-masa awal peserta didik masuk dalam sekolah, pada saat inilah hendaknya guru mengajarkan konsep peraturan dan disiplin di dalam kelas dan sekolah; (3) Membuat respon atau tanggapan yang tepat apabila timbul suatu masalah. Contoh

dari kasus ini ialah apabila terdapat peserta didik yang tertangkap menyontek atau ketika terdapat peserta didik bertanya mengenai sesuatu yang sulit untuk dijawab oleh guru.

#### **2.1.3.5 Evaluasi peserta didik**

Gronlund dalam Siregar (2014:142) menjelaskan definisi mengenai evaluasi, "*Evaluation is a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupil*". Evaluasi terbagi menjadi dua yakni evaluasi dari pihak luar dan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru yang disebut sebagai evaluasi diri, Susilo (2008:162) menyatakan, "Evaluasi diri merupakan bagian dari proses peningkatan mutu kinerja sekolah atau pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan". Ilahi (2013:187) menyatakan, "Evaluasi berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar, baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokulikuler, maupun ekstrakurikuler". Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan penilaian proses dan hasil kegiatan peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pencapaian kompetensi peserta didik itu sendiri.

Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mengukur kemajuan peserta didik setelah peserta didik tersebut menempuh pendidikan dalam jangka waktu tertentu; (2) Mengukur keefektifan metode yang digunakan untuk mendidik peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan fungsi evaluasi ialah: (1) Memberikan motivasi dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar; (2) Sebagai bahan pertimbangan kenaikan tingkat peserta didik atas dasar informasi tentang kemajuan belajar atau keterlambatan belajar peserta didik; (3) Menentukan

kemajuan peserta didik; (4) Dalam kaitannya dengan pembimbingan dan penyuluhan, dapat digunakan sebagai sumber data; (5) Sebagai sumber informasi bagi wali peserta didik, guru dan peserta didik itu sendiri mengenai pencapaian peserta didik (Imron, 2011:119).

Dalam pelaksanaannya, evaluasi peserta didik dapat dilaksanakan melalui dua jenis teknik evaluasi, yakni teknik evaluasi tes dan teknik evaluasi non tes. Teknik evaluasi ialah cara yang digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi. Teknik evaluasi tes dapat dibagi dalam tiga jenis, diantaranya: (a) Tes diagnostik, yakni tes yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidik dapat menentukan perlakuan yang tepat kepada peserta didik; (b) Tes formatif, yakni tes yang dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan peserta didik setelah melalui program tertentu. Jenis tes ini digunakan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar; (c) Tes sumatif, yakni tes yang dilaksanakan setelah peserta didik melalui serangkaian program atau pokok bahasan. Adapun jenis tes ini dilaksanakan dalam rangka menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik (Badrudin, 2014:62-63). Dapat dikatakan bahwa teknik evaluasi non tes ialah alat evaluasi yang tidak termasuk dalam evaluasi tes. Adapun beberapa jenis teknik evaluasi non tes ialah observasi, angket, sosiometri, wawancara, dan lain sebagainya.

Setelah evaluasi terlaksana, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terhenti sampai disana, perlu diadakan tindak lanjut atas evaluasi tersebut. Imron (2011:139) menguraikan beberapa kegiatan tindak lanjut yang meliputi: (1)

Mengadakan pengayaan apabila materi yang telah diajarkan kepada peserta didik sudah dikuasai seluruhnya. Hal ini dilaksanakan agar peserta didik yang telah menguasai materi, menjadi semakin kaya pengetahuannya; (2) Mengadakan program remedial. Program remedial dapat dilaksanakan apabila secara individu atau secara berkelompok, peserta didik gagal untuk mencapai hasil belajar yang telah disepakati. Hal ini dapat diartikan sebagai tanggung jawab guru sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran dan salah satu implementasi pelayanan bimbingan kesiswaan (Badrudin, 2014:63); (3) Mengulangi pembelajaran. Hal ini dapat terjadi atas pertimbangan apabila sebagian besar peserta didik belum menguasai materi berdasarkan hasil evaluasi; (4) Mengadakan, promosi, kenaikan kelas dan kelulusan. Salah satu tujuan penting diadakannya evaluasi yakni supaya dapat diketahui peserta didik mana saja yang layak untuk dipromosikan, dinaikkan tingkat atupun diluluskan ; (5) Pelaporan. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada orangtua peserta didik, peserta didik itu sendiri dan kepala sekolah. Bagi peserta didik pelaporan ini merupakan umpan balik mengenai hasil belajarnya. Untuk orangtua peserta didik yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam pendidikan anak, berhak untuk mendapatkan laporan yang biasanya berbentuk buku raport. Sedangkan bagi kepala sekolah, pelaporan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dalam manajemen sekolah.

## **2.1.4 Pendidikan Inklusif**

### ***2.1.4.1 Pengertian Pendidikan Inklusif***

Pendidikan inklusif lahir atas kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Garnida



(2015:48) menyatakan, “Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing”. Kustawan (2012:8) mengemukakan, “Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu”. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada pasal 1 dijelaskan, “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan bersifat terbuka yang menerima semua peserta didik dengan atau tanpa kebutuhan khusus serta mengakomodasi semua kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Dalam permendiknas nomor 70 tahun 2009 tersebut, dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan “Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”. Hal ini bermakna bahwa hakikatnya setiap sekolah baik itu berstatus ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif atau tidak hendaknya turut mendukung pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik. Pendidikan inklusif merupakan salah satu usaha

untuk meniadakan hambatan-hambatan bagi setiap individu yang memiliki berbagai latar belakang kebutuhan sehingga dapat mengakses layanan pendidikan yang dilengkapi dengan berbagai layanan pendukung (Kemendikbud, 2015:5).

#### **2.1.4.2 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus**

Ilahi (2013:138) menyatakan, “Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pendidikan yang lebih intens”. Kustawan (2012:23) menyatakan, “Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang karena suatu hal khusus membutuhkan pelayanan pendidikan khusus supaya potensinya dapat berkembang secara optimal”. Garnida (2015:1) mendefinisikan, “Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya”. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak atau peserta didik yang memiliki keadaan khusus sehingga dalam kegiatan pendidikan diperlukan pelayanan khusus agar potensi dirinya dapat berkembang secara optimal.

Untuk menentukan peserta didik berkebutuhan khusus atau tidak, kemudian apa tipe kebutuhan khusus peserta didik dapat dilakukan dengan proses identifikasi awal dan asesmen peserta didik. Identifikasi dimaknai sebagai proses penyaringan (*screening*) untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru atau profesional terkait penggunaan alat/instrumentasi standar maupun nonstandar yang dikembangkan oleh guru atau profesional terkait tersebut.

Asesmen adalah tindakan untuk menemukenali kondisi peserta didik, meliputi aspek: potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Agar asesmen dapat memperoleh hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli terkait, seperti dokter, psikolog, pedagog, orthopedagog, dan profesi spesifik lain yang terkait. Dalam konteks pembelajaran dan layanan kekhususan, hasil asesmen dapat dipergunakan untuk menetapkan kemampuan awal (baseline) peserta didik sebelum memperoleh layanan pendidikan maupun intervensi kekhususan yang diperlukan (Kemendikbud, 2011:14).

Secara khusus hasil asesmen dapat berfungsi dalam hal-hal berikut: (1) Sebagai dasar perencanaan pembelajaran Individual. Data hasil asesmen yang menggambarkan potensi, karakteristik, keunggulan dan kelemahan peserta didik, selanjutnya dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam penentuan program pembelajaran (perencanaan pembelajaran) secara individual bagi peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, penentuan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus selalu didasarkan pada hasil asesmen yang telah dilakukan. Begitu pula dengan perumusan kurikulum modifikasi, indikator utama modifikasi kurikulum juga didasarkan pada hasil asesmen; (2) Sebagai dasar evaluasi dan monitoring. Standar kegiatan evaluasi dan monitoring bagi peserta didik

berkebutuhan khusus didasarkan pada base line yang ditetapkan dari hasil asesmen. Lebih lanjut penentuan perolehan hasil belajar ditentukan dari peningkatan kemampuan atau tingkat perubahan dari base line yang telah ditetapkan sebelumnya.; (3) Sebagai dasar pengalihan (referral). Pertimbangan pengalihan penanganan kasus sesuai hasil asesmen mengacu keahlian (profesionalitas) yang kompeten. Contohnya adalah seorang guru (pedagog) menemukan peserta didiknya mengalami hambatan dalam pengendalian emosi, maka guru tersebut mengalih tangankan penanganan emosi peserta didiknya tersebut kepada psikiater. Dalam konteks pendidikan inklusif penanganan lintas profesi menjadi keharusan, karena keragaman karakteristik peserta didik menuntut layanan lintas profesi yang profesional (Kemendikbud, 2011:16).

#### ***2.1.4.3 Tujuan Pendidikan Inklusif***

Dalam penyelenggaraannya, pendidikan inklusif di Indonesia secara umum memiliki beberapa tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Memberikan kesempatan yang terbuka bagi setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, bakat istimewa, ataupun potensi-potensi tertentu untuk berkembang di lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya; (2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif terhadap setiap peserta didik (Kustawan, 2012:9).

Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan pendidikan inklusif dapat dibagi menjadi lima poin, yakni: (1) Memberikan kesempatan terbuka bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, termasuk pula bagi anak berkebutuhan khusus; (2) Ikut serta dalam proses

pengoptimalan program wajib belajar; (3) Meminimalisir angka peserta didik tinggal kelas dan peserta didik putus sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; (4) Menciptakan sistem pendidikan yang ramah terhadap perbedaan, keanekaragaman, toleransi, tidak diskriminatif dan ramah secara pembelajaran; (5) Menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya: Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat 2 yang menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya”, UU RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, terutama pada pasal 5 ayat 1 yang mengamanatkan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terutama pasal 51 yang mengamanatkan “Anak yang mengalami cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa” (Garnida, 2015:43-44).

Dalam pelaksanaannya, tentu penyelenggara pendidikan inklusif diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sehingga penyelenggara pendidikan dapat dikatakan berhasil. Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif menurut Kemendikbud ada sembilan aspek (2015:13-14) dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Faktor pemengaruh keberhasilan pendidikan inklusif

Aspek	Tidak berhasil	Berhasil
Rasional	Manfaat atau keuntungan dari Penyelenggaraan pendidikan Inklusif belum terkomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat	Semua staf sekolah terlibat dalam pengembangan rasional penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan manfaat penyelenggaraan Inklusif bagi seluruh siswa telah terkomunikasikan dengan jelas
Ruang lingkup	Perubahan-perubahan yang dilakukan di awal terlalu ambisius, atau terlalu luas, atau bahkan sangat terbatas	Sekolah memulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu (satu atau dua orang siswa) dan belajar dari kesalahan kesalahan serta keberhasilannya sebelum melangkah lebih jauh yang melibatkan siswa siswa lainnya
Ke-cepatan bertindak	Perubahan yang dilakukan terlalu terburu-buru atau malahan terlalu lambat sehingga memungkinkan adanya penurunan antusiasme dari pihak yang terlibat	Kecepatan implementasi Inklusif bervariasi dari satu pengaturan (setting) ke setting lainnya. Kolaborasi yang intens dengan pihak pihak yang terlibat serta ulasan secara berkala terhadap kecepatan perubahan akan membantu dalam menjamin keberhasilan
Sumber daya	Tidak tersedianya sumber daya yang tepat atau sumber daya ditempatkan tidak sesuai dengan peruntukannya	Penyediaan sumber daya yang kuat akan membantu terbentuknya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan Inklusif. Selain itu, sekolah pun harus dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya
Komit-men	Komitmen jangka panjang untuk terimplementasinya pendidikan Inklusif tidak dijaga	Kolaborasi di antara bagian bagian yang terlibat membantu untuk tetap terbentuknya komitmen jangka panjang. Ketika anggota terlibat dalam suatu tindakan, maka mereka akan lebih merasa memiliki dan berkepentingan dengan kesuksesannya
Staf inti	Anggota staf yang dianggap penting bagi keberhasilan pendidikan Inklusif kurang berkomitmen atau terlalu banyak tugas yang dipikul	Staf inti dianggap sebagai pemimpin dan motivator yang tugasnya menjamin kolaborasi yang setara antar anggota dalam komunitas sekolah. Tetapi mereka bukan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi Inklusif dibanding anggota lainnya
Orang tua	Orang tua tidak terlibat atau tidak berkolaborasi dengan sekolah dalam menciptakan situasi yang Inklusif	Orang tua dilibatkan sebagai pihak yang dapat memberikan kontribusi dan diberikan dorongan sehingga pandangan, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dimanfaatkan dan dihargai
Ke-pemimpin an	Pemimpin sekolah terlalu mengontrol atau tidak mendorong stafnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi	Pimpinan sekolah memfasilitasi kolaborasi tim kerja, memberi dorongan anggota secara individual dan menjamin bahwa ide-ide mereka teraktualisasi
Hubung-an dengan pihak lain	Pendidikan Inklusif tidak melibatkan pihak-pihak lain	Inklusif dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dari pengembangan sekolah secara umum dan hubungan dengan berbagai pihak sangatlah penting

Sumber: *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak* (Kemendikbud, 2015:13-14)

#### **2.1.4.4 Fungsi Pendidikan Inklusif**

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, dapat diidentifikasi dua fungsi utama dalam model pendidikan ini yakni: (1) Memberikan jaminan kepada seluruh peserta didik agar mereka mendapatkan akses dan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara bermutu; (2) Menciptakan lingkungan pendidikan dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif agar seluruh peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Secara keseluruhan, pendidikan inklusif berfungsi untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada seluruh peserta didik baik itu dengan atau tanpa kebutuhan khusus untuk selanjutnya diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang/lingkungan pendidikan yang kondusif bagi setiap peserta didik agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka masing-masing (Kustawan, 2012:10).

Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana serta penataan lingkungan; (2) Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan; (3) Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik; (4) Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi

semua peserta didik termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; (5) Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah (Kemendikbud, 2011:11).

#### **2.1.4.5 Prinsip Pendidikan Inklusif**

Farrel dalam Ilahi (2013:51) menguraikan prinsip dasar pendidikan inklusif yang terbagi menjadi tiga, adapun prinsip tersebut ialah: (1) Pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua “jenis” peserta didik; (2) Pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif *labelling*; (3) Pendidikan inklusif selalu melakukan *check and balances*.

Adapun prinsip pendidikan inklusif menurut Kemendikbud (2015:12) adalah sebagai berikut:

##### **2.1.4.5.1 Pendidikan yang ramah**

Implementasi dari prinsip pendidikan yang ramah ini ialah dengan menciptakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang ramah untuk anak, baik itu berkebutuhan khusus atau bukan, selain itu dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran serta pelayanan dengan sepenuh hati dari guru sebagai pendidik.

##### **2.1.4.5.2 Mengakomodasi kebutuhan peserta didik**

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara mengakomodasi kebutuhan peserta didik seperti memerhatikan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik yang berbedabeda, menggunakan kurikulum yang fleksibel, menggunakan



metode pembelajaran yang bervariasi dan dapat dijangkau oleh pemahaman setiap anak yang tentunya berbeda-beda, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar, serta melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses pendidikan.

#### **2.1.4.5.3 *Mengembangkan potensi peserta didik semaksimal mungkin***

Dalam sekolah inklusif diharapkan pelaksana pendidikan dapat membantu setiap individu peserta didik dalam kaitannya dengan mengatasi segala hambatan yang mereka miliki dan mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Partisipasi dan peran tersebut antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan. Partisipasi dan peranan ini dapat dioptimalkan melalui: (1) komite sekolah, (2) dewan pendidikan; dan (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif (Kemendikbud, 2011:32).

#### **2.1.4.6 *Landasan yuridis pendidikan inklusif***

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945 Pasal 31: Ayat (1) mengamanatkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. Pasal 49 “Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Ayat (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (2): “Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus”. Ayat (3) “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Ayat (4) “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 11 ayat (1) dan (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Pasal 12 ayat (1) “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap peserta

didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1) “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Ayat (2) “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.” Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara *inklusif* atau berupa *satuan pendidikan khusus* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Pasal 45 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

- d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## 2.2 Kajian Empiris

Kajian empiris pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan teori maupun metode yang digunakan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti, meliputi:

- (1) Andryady, Setiawan M (2016) dari Universitas Negeri Malang dalam Jurnal Manajemen Pendidikan yang berjudul *Eksistensi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif di Era Globalisasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) manajemen kurikulum dalam sekolah inklusi perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa dari kurikulum reguler sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (2) peningkatan kualitas pendidikan inklusif di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademik, melainkan aspek non akademik baik penyelenggaraannya dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler; (3) Dalam pengelolaan pendidikan inklusif jumlah guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak perlu ditambah tetapi disediakan guru pendidikan khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan center; Dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi dapat diakomodasikan melalui wadah: (a) komite sekolah, (b) dewan pendidikan; (c) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

- (2) Fadhilah, dkk. (2014) dari Universitas Syah Kuala dalam Jurnal Administrasi Pendidikan dengan judul *Manajemen Kesiswaan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Cot Gue Kabupaten Aceh Besar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan manajemen kesiswaan disusun oleh kepala sekolah bersama wakil kepala bidang kesiswaan meliputi program Penerimaan Siswa Baru, daya tampung siswa baru, dan proses seleksi siswa baru. Semua perencanaan tersusun disusun dan terdokumentasi. Pelaksanaan manajemen kesiswaan disesuaikan dengan perencanaan yang disusun, baik menyangkut dengan penerimaan siswa baru maupun kegiatan-kegiatan kesiswaan. Pengawasan manajemen kesiswaan berpedoman pada sistem manajemen, yaitu mengupayakan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan dan pengawasan dengan baik. Kepala sekolah dan guru melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen kesiswaan. Baik kepala sekolah maupun guru melaksanakan peran dan tanggungjawabnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk keberhasilan manajemen kesiswaan. Kegiatan dan aspek penilaian manajemen kesiswaan berpedoman pada rencana yang disusun. Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan dan memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Hamzah. (2017) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian *Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SDN No. 52 Lerekang Kec. Polongbankeng Utara Kab. Takalar*. Hasil peneltian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penerimaan siswa baru pada SDN No. 52 Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sudah sesuai dengan aturan dan syarat

yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Permasalahan manajemen kesiswaan yang didapatkan antara lain pencatatan dan pelaporan kesiswaan khususnya dalam buku induk tidak diisi data siswa secara lengkap dan tidak semua guru melakukan presensi kepada siswa, kurangnya pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru, dan layanan perpustakaan di sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal, fasilitas juga kurang memadai sehingga tidak pernah digunakan untuk proses pembelajaran.

- (4) Hufron, Achmad. dkk. (2016, Volume 4, No. 2, Hal 95-105) dari SDN 5 Kebumen, Jawa Tengah dan Universitas Negeri Malang dalam Jurnal Pendidikan Humaniora yang berjudul *Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Inklusi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan PPDB baik siswa reguler maupun siswa ABK dilaksanakan bersamaan sesuai dengan juklak PPDB di SDN 1 Surotrunan, siswa ABK di seleksi yang diterima adalah ABK yang mempunyai jenis kebutuhan ringan ke sedang, sedangkan SDN Pecarikan menggunakan sistem promosi. Kedua, siswa ditempatkan menjadi satu kelas, pengelompokan siswa berdasarkan kecerdasan, kemampuan akademik, dan kebutuhan khusus. Ketiga, pembinaan kesiswaan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan kegiatan insidental. Sekolah mewajibkan pendamping (shadow) untuk siswa ABK.
- (5) Irfan, Moh, dkk. (2013) dari Universitas Negeri Malang dalam Jurnal Manajemen Pendidikan yang berjudul *Manajemen Peserta Didik di Sekolah Satu Atap*. Hasil penelitian menunjukkan tahapan dalam manajemen peserta didik mulai dari proses perencanaan, penerimaan peserta

didik baru, pengelompokan, pengaturan mutasi dan *drop out*, pengaturan disiplin dan tata tertib, pembinaan, hingga penilaian di Sekolah Satu Atap.

- (6) Junaidi (2015, Vol. III, No. 1; 37-46) dari Kementerian Agama Kota Sawahlunto dalam Jurnal al-Fikrah yang berjudul *Pelaksanaan Manajemen Peserta Didik pada MAN Beringin Kota Sawahlunto*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan manajemen peserta didik pada MAN Beringin Kota Sawahlunto secara umum sudah terlaksana dengan baik sesuai fungsi manajemen; dan 2. Pelaksanaan manajemen Bimbingan dan Konseling meskipun sudah terlaksana namun belum optimal, belum ada program kerja BK yang terencana, serta dukungan sarana dan prasarana BK yang memadai.
- (7) Karana, Dian Putera. (2016, Volume 4, No. 1, Hal 63-76) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo dalam Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan yang berjudul *Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh*. Hasil penelitian sebagai berikut. (1) MPI di SDN Gadingan dilihat dari standar pelayanan minimum termasuk dalam kategori sangat baik dan di MI Ma'arif Pagerharjo termasuk kategori baik. (2) Perbedaan MPI di SDN Gadingan dan MI Ma'arif Pagerharjo terletak pada komponen standar: pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. (3) Hambatan: belum adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, minimnya jadwal guru pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, minimnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana. (4) Solusi: menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, menambah waktu/jadwal guru

pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, mengusulkan penambahan anggaran dan memenuhi sarana dan prasarana, serta rekomendasinya: pengembangan wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan, optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana, dan pemenuhan kebutuhan anggaran/pembiayaan.

- (8) Lestari F dan Sujarwanto (2017) dari Universitas Negeri Surabaya dalam Jurnal Pendidikan Khusus yang berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Sidoarjo meliputi, 1) manajemen siswa dimulai dengan adanya perencanaan penerimaan siswa baru melalui analisis aktivitas persyaratan penerima. Implementasi penerimaan siswa berkebutuhan khusus melalui jalur inklusi yang dilakukan dengan mengacu pada mekanisme dan persyaratan pendaftaran yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan pendaftaran siswa Sidoarjo. 2) manajemen kurikulum terkait pengembangan penggunaan kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. 3) pengelolaan proses pembelajaran di kelas inklusif dimulai dengan rencana pembelajaran yang menganalisis berdasarkan competence, indikator, rencana pelajaran dengan memodifikasi konsep. Secara struktural latihan pembelajaran dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam rencana pelajaran dengan memodifikasi konsep dan evaluasi untuk siswa berkebutuhan khusus termasuk 3 aspek evaluasi yaitu, sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan kemampuan peserta didik. 4) manajemen pendidik yang terkait dengan perencanaan pendidik khusus dimulai dengan catatan kebutuhan



guru untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian sekolah mengadakan asisten guru rekrutmen dan seleksi. 5) pengelolaan fasilitas dengan analisis kebutuhan fasilitas yang diperlukan dengan cara membeli. Secara umum ketersediaan fasilitas di sekolah inklusif sudah cukup dengan pusat sumber daya, ruang terapi, media pembelajaran khusus dan alat bantu belajar.

- (9) Maftuhatin, Lilik (2014, Volume 5, Nomor 2; 201-227) dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang – Indonesia dalam *Religi: Jurnal Studi Islam* yang berjudul *Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran sudah cukup bagus karena guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu dengan soal yang disamakan dengan reguler dan yang kedua dengan soal sesuai dengan kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio yang mencatat perkembangan mereka selama pembelajaran.
- (10) Mulyadi, A (2017) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia dalam *Jurnal Policy & Governance Review* Volume 1, Issue 3, September 2017 dengan judul penelitian *Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ditemukan bahwa jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif telah meningkat secara signifikan, didukung juga oleh peraturan provinsi dan kabupaten terkait. (2) konteks kebijakan pendidikan inklusif sebagai pedoman utama untuk implementasi kebijakan mengarah ke berbagai perspektif dan bahkan mempersempit pada konsep inklusi; (3) diskusi lebih lanjut masih perlu

diketahui karena hal yang esensial serta implementasi pendidikan inklusif juga mengangkat beberapa masalah pro dan kontra, diantara isu-isu termasuk kemungkinan untuk mengakomodasi semua peserta didik dengan berbagai keragaman dan kebutuhan, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia, dan juga penerimaan semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pelaksanaan pendidikan inklusif untuk mencapai tidak ada diskriminasi dalam situasi apa pun dari peserta didik dalam pendidikan untuk semua.

(11) Nurhayati (2014) dari SMP Melati, Bekasi dalam Jurnal Manajemen Pendidikan yang berjudul *Manajemen Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Sekolah Inklusi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi manajemen layanan pendidikan di Sekolah Melati Indonesia dilakukan dalam struktur sederhana yang mengacu pada visi-misi. Hal ini tercermin dalam rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia dalam organisasinya; (2) manajemen organisasi dikembangkan sebanyak mungkin dilakukan setiap tahun akademik untuk menyusun struktur organisasi belajar mengajar dengan baik (3) manajemen pengembangan sumber daya manusia masih memberi prioritas pengembangan profesional dan pembinaan karier.

(12) Nwakpa, Paul (2015) dari Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria dalam Journal of Research in Humanities and Social Science dengan judul penelitian *Student Personnel Management: A Panacea for Effective Secondary School Administration in Nigeria*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jika manajemen peserta didik tidak ditangani dan dikelola dengan bijaksana, akan memberi dampak buruk pada sistem pendidikan karena kualitas buruk dan

lulusan setengah matang akan dikirim keluar dari sekolah ke pasar tenaga kerja; (2) partisipasi siswa dalam kehidupan sekolah berkontribusi besar bagi kelancaran dan keteraturan sekolah dan juga membawa peningkatan dalam komunikasi yang akan mengarah pada pemahaman, kerja sama, dan interaksi yang lebih baik; (3) setiap siswa harus diamati dan dipelajari secara sistematis sebagai individu oleh guru dan kepala sekolah karena hal ini akan menjadikan manajemen peserta didik yang efektif.

- (13) Pramachintya, D.R. & Sutrisno, (2015;27:1) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Jurnal Varia Pendidikan yang berjudul *Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persiapan tahun ajaran baru terdiri dari: a) pengaturan panitia penerimaan, b) pengaturan program kerja, c) persiapan dokumen administrasi d) persiapan infrastruktur. 2) Proses terdiri dari: a) penentuan tahap implementasi penerimaan siswa baru: pengambilan pendaftaran bentuk b) pelaksanaan tes observasi siswa baru (lisan dan tulisan), c) pelaksanaan tes wawancara orang tua dari siswa baru, d) proses seleksi dan penilaian tes observasi, e) pengumuman hasil penerimaan baru siswa, f) administrasi kegiatan pra-pendaftaran. 3) Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan proses penerimaan: a) melakukan persiapan penerimaan siswa baru tadi, b) meningkatkan jumlah siswa dengan melakukan promosi, c) menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, d) membina komunikasi aktif dan diskusi dengan yayasan pemimpin, e) peningkatan kualitas sekolah dan sumber daya manusia.

- (14)Puri, A, dkk. (2016) dari Universitas Riau dalam Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan judul *Analisis Manajemen Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara keseluruhan diperoleh persentase 74,88%, berada pada kategori baik. Sedangkan jika dilihat dari masing-masing indikator, Indikator Perencanaan Calon Peserta Didik mendapatkan persentase sebesar 77,43% dikategorikan baik, indikator Pengaturan Peserta Didik Baru mendapatkan persentase sebesar 73,88% berada pada kategori baik, indikator mengelompokkan peserta didik mendapatkan persentase sebesar 81,50% berada pada kategori sangat baik, indikator mencatat kehadiran peserta didik mendapatkan persentase sebesar 83,67% berada pada kategori sangat baik, indikator membina kedisiplinan peserta didik mendapatkan persentase sebesar 76,00% berada pada kategori baik, indikator mengatur mutasi/perpindahan peserta didik mendapatkan persentase sebesar 67,60% berada pada kategori baik. Indikator mengatur kelulusan peserta didik mendapatkan persentase sebesar 80,80% berada pada kategori sangat baik dan masih perlu pembinaan yang difokuskan pada indikator mengatur program layanan khusus dimana mendapatkan persentase sebesar 55% dikategorikan cukup.
- (15)Sari, Sinta Maya (2012) dari Universitas Negeri Malang dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dengan judul *Manajemen Peserta Didik pada Sekolah Satu Atap Sebagai Penuntasan Wajib Belajar di Daerah Terpencil*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan umum pengembangan SD-SMP Satu

Atap ini sebagai berikut: (1) Direktorat Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) menyelenggarakan sosialisasi program ditingkat pusat selanjutnya Satuan Kerja (Satker) perluasan peningkatan mutu pembelajaran SMP meminta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan proposal bagi sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria; (2) Proposal yang diajukan tersebut Satker perluasan dan peningkatan mutu pembelajaran SMP melakukan seleksi awal untuk menentukan sekolah yang layak untuk diverifikasi; (3) Satker perluasan dan peningkatan mutu pembelajaran SMP melakukan verifikasi lapangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari hasil verifikasi tersebut ditentukan hasil calon-calon sekolah yang layak untuk dikembangkan sebagai SD-SMP Satu Atap; (4) Setelah SD ditetapkan sebagai salah satu lokasi SD-SMP Satu Atap, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota menetapkan kelembagaan SD-SMP Satu Atap, menunjuk Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap, Wakil Kepala Sekolah dan Wakil TU, guru baik guru tetap atau guru bantu; dan (5) Kepala Sekolah membentuk panitia pengembangan SDSMP Satu Atap sesuai dengan ketentuan, penerimaan peserta didik baru, penyiapan tenaga pendidik, penyiapan sarana belajar, penyusunan RPP, dan juga penyiapan pembiayaan awal.

- (16) Shaifudin, A. (2015) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian *Manajemen Peserta Didik Berbasis Pesantren dalam Pembentukan Karakter (Studi atas MA Salafiyah Mu'adalah Pondok Tremas Pacitan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen peserta didik

berbasis pesantren dalam pembentukan karakter di MA Salafiyah Mu'adalah menggunakan tiga langkah strategi, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dan dalam aplikasinya menggunakan empat fungsi manajemen, yaitu; (1) Perencanaan: (a) menentukan nilai-nilai karakter yang diprioritaskan, (b) melakukan sosialisasi, (c) mempersiapkan program harian, dan (d) melaksanakan pembiasaan dalam perilaku keseharian. (2) Pengorganisasian: membentuk struktur organisasi melalui Tim Majelis Ma'arif. (3) Pelaksanaan: mencanangkan empat program, yaitu: (a) sistem formal, (b) sistem non formal, (c) sistem organisasi, (d) sistem vokasional. (4) Pengawasan: pengawasan langsung dan melalui evaluasi Kepala Sekolah bersama Dewan Majelis Ma'arif.

- (17) Suminar, Wahyu (2017, Vol. 1, No. 2: 389-406) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam Jurnal Muslim Heritage yang berjudul *Manajemen Peserta Didik Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pacitan*. Hasil penelitian ini adalah, bahwa 1) Manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa di MAN Pacitan mencakup tiga aspek yakni pelayanan, pembinaan dan pengawasan dengan berbagai kegiatan di dalamnya yang berupaya mengembangkan potensi, bakat dan minat peserta didik dari segi akademis dan non akademis dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi siswa. 2) Pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi peserta didik di MAN Pacitan dikembangkan melalui multiple intelligence, peserta didik yang memiliki kecerdasan dan kegemaran lebih dalam hal mata pelajaran atau akademis diwadahi dengan kegiatan seperti

diskusi dengan membentuk grup mata pelajaran, bedah SKL, dan bimbingan belajar lainnya. Sedangkan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan kegemaran lebih di bidang non akademis diwadahi dengan berbagai kegiatan di luar kelas yaitu kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Muhadhoroh, MTQ, PMR, UKS, Risma, Teater, Jurnalistik, KIR, Seni Musik dan Kaligrafi, dan Olah raga.

- (18) Sunardi dan Sunaryo (2011, Vol 10. Nomor 2) dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus yang berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendidikan inklusi yang menekankan kepada persamaan hak dan akses pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara, tanpa kecuali, hakekatnya adalah visi baru di bidang pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik yang menekankan kepada pilar demokrasi, HAM, otonomi, desentralisasi, dan akuntabilitas; (2) Dalam konteks pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi merupakan paradigma baru dalam pendidikan bagi penyandang cacat yang diilhami dan didorong oleh berbagai dokumen internasional; (3) Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini semakin diterima dan berkembang cukup pesat, namun dalam tataran implementasinya masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya.

- (19) Suprpto, Ribut. (2017, Vol. IX, No 1: 184-197) dari Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Banyuwangi dalam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam yang berjudul *Pengaruh Manajemen Kesiswaan Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran SKI Siswa Kelas VIII E MTsN Sambirejo Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh Penerapan manajemen kesiswaan di MTsN Sambirejo baik. (2) Hasil pengaruh penerapan manajemen kesiswaan di kelas VIII E MTsN Sambirejo baik. (3) Pengaruh penerapan manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar VIII E di MTsN Sambirejo ada. (4) pengaruh penerapan manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar siswa kelas VIII E di MTsN Sambirejo sebesar 19,1%.
- (20) Taufan, Johandri & Mazhud, Fachri (2014) dari Universitas Negeri Padang dalam Jurnal Penelitian Pendidikan yang berjudul *Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang di buat oleh kepala sekolah sebagai sebuah usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Dari proses hasil penelitian dan pembahasan ini, disusunlah sebuah desain kebijakan yang merupakan hasil desain peneliti terkait pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi memberikan



kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

(21) Ummah, U. S., Pambudy, A. P. (2017). Dari Universitas Negeri Malang dalam *International Journal of Social Sciences & Educational Studies* yang berjudul *Management of Inclusive Education Institutions (A Case Study of an Inclusive Education Provider's Primary School in Bandung and Sidoarjo City, Indonesia)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan di kedua sekolah berbeda dalam hal persiapan kurikulum, manajemen peserta didik, fasilitas dan infrastruktur kedua sekolah termasuk media pembelajaran dan aksesibilitas sekolah tidak sepenuhnya mendukung, manajemen waktu pendidik dan administrator pendidikan untuk perekrutan karyawan. Aspek lain yang dijelaskan adalah tentang sumber keuangan dan biaya sekolah, dan juga kebijakan yang terkait dengan siswa berkebutuhan khusus. Singkatnya, hasilnya menunjukkan kedua sekolah menerapkan nilai-nilai inklusif, namun aspek-aspek itu perlu ditingkatkan.

(22) Unoma, Chidobi R (2015) dari Enugu State University of Science and Technology (ESUT), Enugu, Nigeria dalam *International Journal of Education and Research* dengan judul penelitian *Administration of Primary Education Topwards Meeting The Challenges of Human Capital Development in Nigeria Beyond 2020*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan dan keputusan efektif akan membuat program pendidikan dasar sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia hingga lebih dari tahun 2020; (2) ditemukan bahwa

manajemen dan pengembangan kurikulum dan pengajaran yang tepat akan membantu dalam memenuhi kebutuhan SDM di Nigeria setelah tahun 2020;

(3) pengadaan waktu dan pengembangan personel staf, manajemen peserta didik, pengelolaan dana dan fasilitas akan sangat membantu dalam memenuhi tantangan SDM tahun 2020.

(23) Witasoka, Dyah (2016, Vol. 3, No. 2, h. 163-192) dari Universitas Negeri Yogyakarta dalam *Journal of Disability Studies* yang berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta*. Hasil Penelitian ini ialah: Pertama, SMA Inklusif tidak memiliki perencanaan khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kedua, SMA Inklusif berusaha melaksanakan kegiatan manajemen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa difabel. Ketiga, Kepala sekolah memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan komunikasi dan interaksi langsung dengan tenaga pendidik, tenaga GPK, bahkan siswa difabel agar dapat memantau pelayanan inklusif yang diberikan.

(24) Yusuf, Munawir (2012, Vol. 18, Nomor 4, h. 382-393) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* yang berjudul *Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dan kepala sekolah di 4 wilayah kabupaten/kota (Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali) dalam 51 SD inklusif: 1) kinerja kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang; 2)

kinerja guru kelas dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang; dan 3) skor kinerja kepala sekolah rata-rata (65,45%), lebih tinggi dibanding skor rata-rata yang dicapai guru (62,3%).

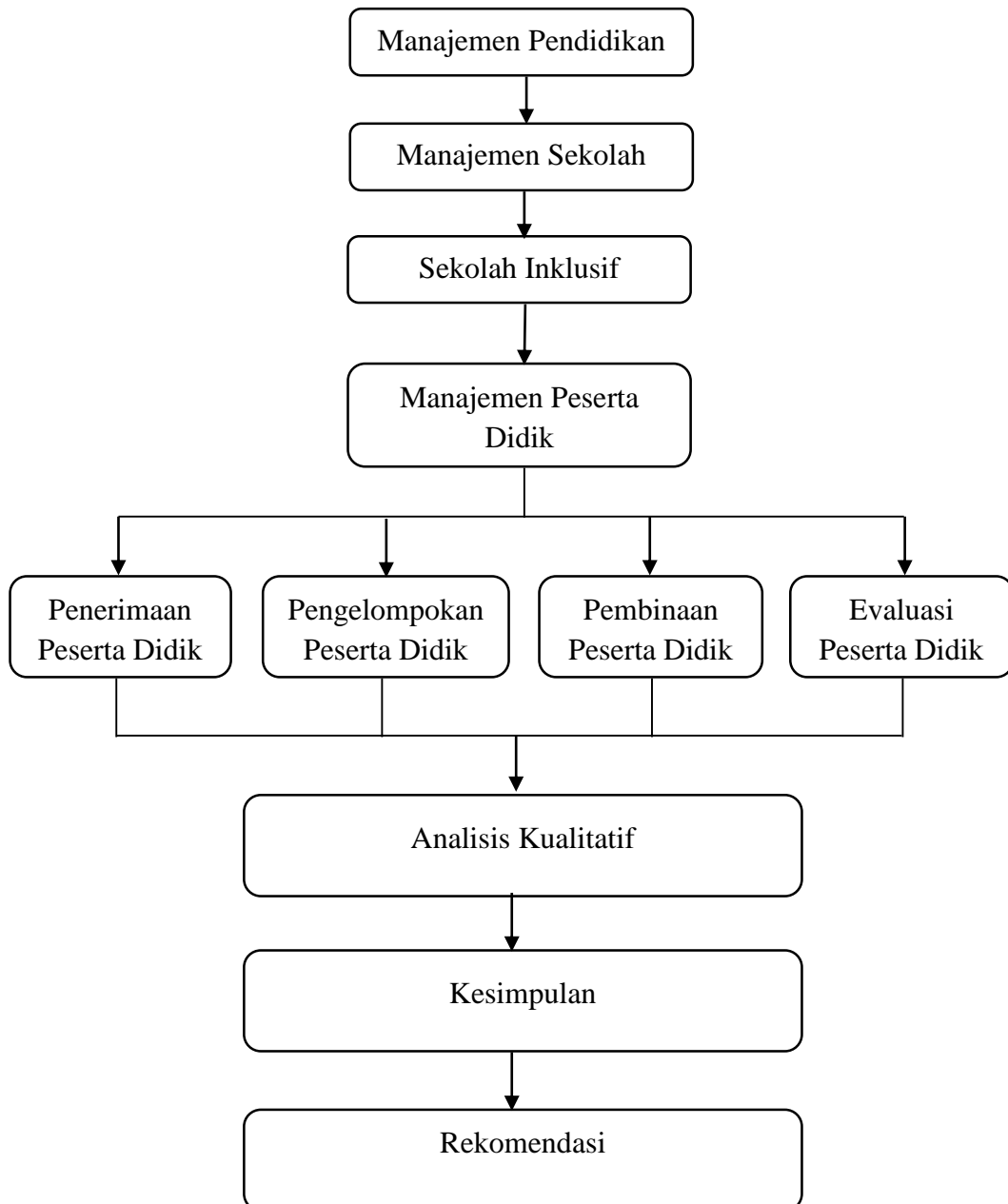
### **2.3 Kerangka Berpikir**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang secara sah dilindungi oleh Undang-Undang. Hal tersebut juga berlaku juga bagi siapapun juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, maka terbentuklah sistem pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan memerlukan manajemen yang baik agar dapat mengeluarkan output yang baik pula. Terlebih lagi pada era *school based management* sekarang ini, sekolah dapat lebih leluasa dalam memajemen satuan pendidikannya sendiri. Dalam manajemen sekolah, terdapat beberapa komponen yang harus dimanajemen dengan baik, salah satunya ialah manajemen peserta didik.

Satuan pendidikan perlu untuk melaksanakan manajemen peserta didik sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan subjek sekaligus objek pendidikan yang paling penting. Dalam manajemen peserta didik dikenal pula beberapa ruang lingkup, beberapa diantaranya ialah penerimaan peserta didik, pengelompokan peserta didik, pembinaan peserta didik dan evaluasi peserta didik. Jika manajemen peserta didik berlangsung dengan baik maka diharapkan peserta

didik dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal selama berada di sekolah. Secara lebih ringkas uraian tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Bagan kerangka berpikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian dan saran. Simpulan hasil penelitian berupa hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, implikasi hasil penelitian berupa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian dan saran yang berupa pesan penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, penjelasan mengenai bab ini sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut.

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, SDN 2 Brebes membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan anggota-anggotanya ditentukan oleh rapat. SD ini menyesuaikan jumlah peserta didik yang akan diterima adalah sama dengan jumlah peserta didik yang lulus di tahun yang sama. Adapun sebagai sekolah inklusif, SDN 2 Brebes membatasi peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima hanyalah tipe *slow learner*/lamban belajar saja karena disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang terbatas.
- (2) Peserta didik di SDN 2 Brebes dikelompokkan dalam setting sekolah berdasarkan usia dan urutan abjad. Adapun dalam setting kelas,

pengelompokan peserta didik disesuaikan dengan mata pelajaran dan kebutuhan yang ada.

- (3) Pembinaan disiplin di SDN 2 Brebes di laksanakan secara klasikal dalam tiga kegiatan, yakni upacara bendera, apel pagi, dan senam. Adapun diluar kegiatan tersebut, wali kelas berperan aktif dalam pembinaan disiplin di kelasnya masing-masing. Apabila terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik, guru akan mengevaluasi tindakan peserta didik tersebut, serta mempertimbangkan apakah sanksi yang tepat bagi pelanggar tata tertib itu.
- (4) Evaluasi hasil belajar peserta didik di SDN 2 Brebes dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu, beberapa diantara evaluasi itu ialah ulangan harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Hasil dari evaluasi hasil belajar peserta didik akan dilaporkan dalam bentuk buku rapor yang diserahkan setiap akhir semester. Lalu pada akhir tahun ajaran, seluruh hasil kegiatan peserta didik selama satu tahun akan dijadikan bahan untuk mempertimbangkan apakah peserta didik dapat naik kelas atau tidak. Adapun syarat kenaikan kelas di SDN 2 Brebes ialah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada kelas untuk satu tahun pelajaran yang diikuti; (2) mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan, yakni minimal sama dengan KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan; (3) mencapai sikap minimal B (Baik) berdasarkan kriteria penilaian sikap yang ditentukan satuan pendidikan; dan (4) nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal Baik.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian yang berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes ialah bahwa kerjasama dan komunikasi intern di dalam sekolah haruslah ditingkatkan. Terutama bagi kepala sekolah, guru, wali kelas, guru pembimbing khusus sebagai pelaksana manajemen peserta didik agar tujuan pendidikan dan tujuan sekolah dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kepala sekolah diharapkan lebih intensif dalam melaksanakan tugasnya pada peningkatan manajemen peserta didik sehingga visi misi dan tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik. Selain itu guru juga diharapkan memahami perlunya kerjasama yang baik untuk meningkatkan mutu sekolah sehingga lulusan dari SDN 2 Brebes mempunyai kualitas yang lebih baik lagi.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

### **5.3.1 Bagi dinas pendidikan**

Dinas Pendidikan dapat memberikan kebijakan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Terutama dalam hal penyediaan guru pembimbing khusus di sekolah yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi sekolah inklusif untuk menolak siswa berkebutuhan khusus dengan alasan keterbatasan sumber daya.

### **5.3.2 Bagi Sekolah**

Sekolah perlu untuk membangun jaringan dengan tenaga ahli seperti psikolog, dokter, ataupun ahli kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan

pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu modifikasi kurikulum juga diperlukan supaya peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berkembang secara lebih optimal di sekolah ini.

### **5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen peserta didik. Agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian tentang manajemen peserta didik. Sehingga dapat memberikan kebermanfaat yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan.

## **5.4 Rekomendasi**

### **5.4.1 Bagi Dinas Pendidikan**

Dinas pendidikan hendaknya segera memberikan kejelasan mengenai keberlangsungan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut mencakup kebijakan mengenai keberlanjutan pendidikan inklusif, bantuan pendanaan, serta penyediaan guru pembimbing khusus pada sekolah yang ditunjuk kabupaten sebagai sekolah inklusif.

### **5.4.2 Bagi Sekolah**

Sekolah dapat membangun jaringan dengan tenaga ahli dalam bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus dapat dilayani dengan lebih baik. Selain itu anak berkebutuhan khusus selain tipe *slow learner* perlu diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmuid, Muhibbuddin. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Pengging Mangkunegaran.
- Albertus, Doni K. 2015. *Strategi Pendidikan Karakter (Revolusi Mental dalam Lembaga Pendidikan)*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ardana, H.R. 2014. *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama PGRI Kecamatan Kasihan*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aslan. 2017. Kurikulum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania. Volume 5 nomor 2*. Online: [dx.doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358](https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358)
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: PT Indeks.
- Direktorat PPK-LK. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fadhilah, dkk. 2014 Manajemen Kesiswaan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Cot Gue Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 2, No. 1:89- 96*. Online: [www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2503](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2503)
- Fatoni, A 2015. Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an. Al-Idarah: *Jurnal Kependidikan Islam. Volume 5 nomor 2* Online: [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/785](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/785)
- Fauzan, Ahmad. 2016. Kepemimpinan Visioner dalam Manajemen Kesiswaan. Al-Idarah: *Jurnal Kependidikan Islam. Volume 6 nomor 1*. Online: [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/791](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/791)
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hamzah. 2017. *Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SDN No. 52 Lerekang Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar*. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hufron, Achmad. dkk. 2016. Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Humaniora. Volume 4, No. 2*, Hal 95-105. Online: <http://journal.um.ac.id/index.php/jph>

- Ilahi, Muhammad T. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Imron, Ali. 1998. "Manajemen Peserta Didik di SD: Masalah, Penyebab, dan Alternatif Pemecahannya". *Jurnal Ilmu Pendidikan, Februari 1998, Jilid 5 nomor 1, hal 15-26*.
- Imron, Ali. 2011. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irfan, Moh, dkk. 2013. Manajemen Peserta Didik di Sekolah Satu Atap. *Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume 24, Nomor 1: 52-60*. Online: [ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/](http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/)
- Junaidi. 2015. Pelaksanaan Manajemen Peserta Didik pada MAN Beringin Kota Sawahlunto. *Jurnal al-Fikrah. Vol. III, No. 1; 37-46*. Online: <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah>
- Karana, Dian Putera. 2016. Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Volume 4 No. 1, Hal 63-76*. Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Kemendikbud. 2015. *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
- Kisbiyanto. 2012. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Mahameru.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Lestari F dan Sujarwanto. 2017. Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Khusus. Volume 9 nomor 4*. Online: [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus)
- Maftuhatin, Lilik. 2014. Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam. Volume 5, Nomor 2; 201-227*. Online: [journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/421](http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/421).
- Mayasari. 2016. "Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta". *INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol 3, No 1, Januari-Juli 2016 hal 1-18*.
- Miles, M. B. & Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, AWE. 2017. Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Jurnal Policy & Governance Review Volume 1, Issue 3*. Online: <https://journal.iapa.or.id/pgr/article/view/57>
- Nafia, Auzid Ilma & Karwanto. 2014. Manajemen Peserta Didik di Smp Baitussalam Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan. Volume 4 Nomor 4:72-8*. Online: [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/7472](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/7472)
- Nurhayati. 2014. Manajemen Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Sekolah Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume 5 nomor 1*. Online: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmp>
- Nwakpa, Paul. 2015. Student Personnel Management: A Panacea for Effective Secondary School Administration in Nigeria. *Journal of Research in Humanities and Social Science. Volume 3 issue 5*. Online: [www.questjournals.org/jrhss/papers/](http://www.questjournals.org/jrhss/papers/)
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Pramachintya, D.R. & Sutrisno. 2015. Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. *Jurnal Varia Pendidikan. Volume 27 nomor 1*. Online: <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/902>
- Prihatin, Eka. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Puri, A, dkk. 2016. Analisis Manajemen Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume 3 nomor 1:1-10*. Online: <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/8482>
- Raco, Jozef Richard. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ristanta, Aan. 2014. *Manajemen Kesiswaan di SD Negeri Puluhan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah - Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Sinta Maya. 2012. Manajemen Peserta Didik pada Sekolah Satu Atap Sebagai Penuntasan Wajib Belajar di Daerah Terpencil. *Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume 23, Nomor 6: 563-571*. Online: <https://studylibid.com/doc/743771/>
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori, Djaman & Komariyah Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Eveline & Hartini, Nara. 2014. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sudadah. 2014. *Kedudukan dan Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 2 November 2014.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Suminar, Wahyu. 2017. Manajemen Peserta Didik Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pacitan. *Jurnal Muslim Heritage. Vol. 1, No. 2: 389-406*. Online: <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage>

- Sunardi dan Sunaryo. 2011. Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol 10. Nomor 2. Online: [ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/3990](http://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/3990)
- Suprpto, Ribut. 2017. Pengaruh Manajemen Kesiswaan Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran SKI Siswa Kelas VIII E MTsN Sambirejo Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. IX, No 1: 184-197. Online: <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/index>
- Susilo, Muhammad Joko. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutomo. 2015. *Manajemen Sekolah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Taufan, Johandri & Mazhud, Fachri. 2014. Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Volume 14 nomor 1. Online: <http://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3213>
- Ummah, U. S., Pambudy, A. P. 2017. Management of Inclusive Education Institutions (A Case Study of an Inclusive Education Provider's Primary School in Bandung and Sidoarjo City, Indonesia). *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*. Volume 4 issue 3. Online: <http://ijsses.org/index.php/volume-4-issue-3-article-12/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Uno. Hamzah B. 2014. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Unoma, Chidobi R. 2015. Administration of Primary Education Topwards Meeting The Challenges of Human Capital Development in Nigeria Beyond 2020. *International Journal of Education and Research*. Volume 3 nomor 6. Online: [www.ijern.com/journal/2015/June-2015/35.pdf](http://www.ijern.com/journal/2015/June-2015/35.pdf)
- Witasoka, Dyah. 2016. Manajemen Pendidikan Inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. *Journal of Dissability Studies*. Vol. 3, No. 2, h. 163-192. Online: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/030202>
- Yusuf, Munawir. 2012. Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume 18, Nomor 4, h. 382-393. Online: [jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/96](http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/96)